

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM  
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**

(Survei Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :  
ADITYA BACHTIAR RIFA'I  
09412147013

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2014**

## PERSETUJUAN

### **PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**

(Survai Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

## SKRIPSI

Oleh:

ADITYA BACHTIAR RIFA'I.

09412147013

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 22 Juli 2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



Dhyah Setyorini, M.Si., Ak.  
NIP. 19771107200501 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM  
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**  
(Survei Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

yang disusun oleh:

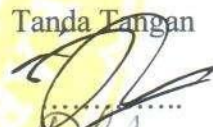


Aditya Bachtiar Rifa'i

NIM 09412147013

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2014

dan dinyatakan lulus

### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc.	Ketua Penguji		2-9-14
Dhyah Setyorini, M.Si., Ak.	Sekretaris Penguji		2-9-14
Abdullah Taman S.E., M.Si., Ak.	Penguji Utama		2-9-14

Yogyakarta, 04 September 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aditya Bachtiar Rifa'i

NIM : 09412147013

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : **PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN  
PENGALAMAN DALAM MENGELOLA BARANG  
MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT** (Survei Pada Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Lingkungan  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Juli 2014

Penulis,

Aditya Bachtiar Rifa'i  
NIM. 09412147013

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri” ( Q.S. Ar Ra’d: 11)*

*”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11)*

*"Barang siapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak." (HR. Abu Dawud no.3641, At-Tirmidziy no.2683, dan isnadnya hasan, lihat Jaami'ul Ushuul 8/6)*

*“Tidak ada perjuangan yang berakhir sia-sia, hasil dari perjuangan adalah sebuah bonus dari sebuah proses perjuangan yang sangat begitu berarti bagi perjalanan hidup yang akan datang” (Penulis).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT beserta Rosul-rosulnya yang telah memberikan segalanya. Terimakasih atas segala cinta, Kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada hamba untuk menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu yang senantiasa mengiringi langkahku dengan segala daya dan doa.
- Aditya Zunan Trianandi, adikku tersayang, kamu pasti bisa menjadi orang sukses dan berhasil menggapai cita-citamu.
- Almh. Eyang Muhasiti, trimakasih atas do'a dan dukungan eyang, semoga eyang tenang di syurga Aamiin.
- Istriku, Mufti Nur Faida yang tercinta, terimakasih atas do'a, dukungan, dan kesabarannya, semoga kita menjadi keluarga yang *bahagia*, *mawadah warahmah* selamanya... Aamiin.
- Herman, Alex, Eko, dan Satrio terimakasih atas semangatnya.
- Keluarga besar Akuntansi PKS 2009, kalian luar biasa.
- Kos 252 Samirono CT VI, terimakasih dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing.
- Keluarga besar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada terimakasih atas dukungannya.
- FE UNY dengan segala ilmu yang kudapatkan.

**PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN DALAM  
MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**

(Survei Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh :

ADITYA BACHTIAR RIFA'I

09412147013

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh Etika dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, (2) mengetahui pengaruh Kompetensi dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, (3) mengetahui pengaruh Pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, (4) dan mengetahui pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersama-sama.

Objek dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Pengelola Barang Milik Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini yaitu pegawai pengelola Barang Milik Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment*, dan uji reliabilitasnya menggunakan *Cronbach Alpha*. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada taraf signifikan 5% menunjukkan (1) terdapat pengaruh etika dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan nilai signifikansi 0,001 dan t hitung 3,528 (2) terdapat pengaruh kompetensi dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan nilai signifikansi 0,000 dan t hitung 4,536 (3) terdapat pengaruh pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan nilai signifikan 0,029 dan t hitung 2,287 (4) secara bersama-sama terdapat pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan nilai f hitung 19,816 dan signifikansi 0,000. Etika, Kompetensi, dan Pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara memberikan kontribusi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar 65,7%, sedangkan sisanya sebesar 34,3% dipengaruhi faktor lain. Sementara kelemahan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dalam hal objektivitas perolehan jawaban responden.

Kata Kunci : Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Kualitas Laporan Keuangan

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Survai Pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadi Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Prof. Sukirno, Ph.D. Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini..
4. Ibu Dhyah Setyorini, M.Si.,Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta penulis sangat berterimakasih sekali telah membantu kelancaran penelitian ini dan sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.



5. Bapak Abdullah Taman, S.E., Akt., M.Si. narasumber yang telah memberikan kritikan, motivasi, saran dan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc. Ketua Penguji penulis dan sebagai pembimbing akademik yang selalu sabar dalam memberikan arahan, kritikan, dan saran selama masa studi.
7. Ibu Arie Yuriwin, S.H., M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta.
8. Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka diridhoi Allah SWT dan dicatat sebagai amalan yang terbaik. Amin. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Juli 2014

Penulis,

Aditya Bachtiar Rifa'i  
NIM. 09412147013

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN KARYA.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMANPERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Pustaka .....	15
B. Kerangka Berpikir .....	30
D. Paradigma Penelitian .....	32
E. Hipotesis Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Waktu Penelitian .....	35
B. Tempat Penelitian .....	35
C. Jenis Penelitian .....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
E. Variabel Penelitian .....	37
F. Operasionalisasi Variabel .....	37
G. Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
H. Teknik Pengumpulan Data .....	41
I. Instrumen Penelitian .....	41
J. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
B. Deskripsi Data Khusus .....	64
C. Hasil Penelitian .....	65
1. Deskripsi Kategori Variabel .....	65
2. Uji Asumsi Klasik .....	70
3. Pengujian Hipotesis .....	73

D. Pembahasan .....	77
E. Keterbatasan Penelitian .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>84</b>
A.Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1. Operasional Variabel.....	38
	2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	42
	3. Skor Alternatif Jawaban .....	43
	4. Rangkuman Uji Validitas Variabel.....	45
	5. Rangkuman Uji Realibilitas Variabel.....	48
	6. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan terakhir.....	64
	7. Deskripsi Responden berdasarkan lama bekerja .....	65
	8. Statistik Deskriptif .....	66
	9. Kategorisasi Etika.....	66
	10. Kategorisasi Kompetensi .....	67
	11. Kategorisasi Pengalaman .....	68
	12. Kategorisasi Kualitas Laporan Keuangan.....	69
	13. Hasil Uji Normalitas .....	71
	14. Hasil Uji Linieritas .....	71
	15. Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
	16. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
	17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
	18. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif .....	76

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1. Paradigma Penelitian .....	33
	2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
	3. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.	64
	4. Diagram Kategori Etika .....	67
	5. Diagram Kategori Kompetensi.....	68
	6. Diagram Kategori Pengalaman.....	69
	7. Diagram Kategori Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pusat .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Uji Coba Instrumen Penelitian.....	90
2. Kuisoner Instrumen Penelitian.....	98
3. Hasil Uji Validitas & Realibilitas	
Variabel Kualitas Laporan Keuangan .....	106
4. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Etika.....	107
5. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kompetensi .....	108
6. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Pengalaman .....	109
7. Hasil Uji Karakteristik Responden.....	110
8. Hasil Uji Kategorisasi Variabel X dan Y .....	111
9. Data Hasil Uji Kategorisasi .....	113
10. Tabel Frekuensi Data.....	115
11. Hasil Uji Normalitas.....	118
12. Hasil Uji Linieritas .....	121
13. Hasil Uji Multikolinieritas .....	124
14. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	125
15. Hasil Uji Regresi .....	126
16. Hasil Uji Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif .....	127

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan teknologi informasi dan ekonomi, disetiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan atau yang sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara salah satunya adalah pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN). Dalam kutipan I Gede Artjana tahun 2004, *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti *Transparancy* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kejujuran), sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena Pengelolaan keuangan negara merupakan hal penting untuk dipertanggung jawabkan karena dana APBN/APBD yang dikelola pemerintah merupakan berasal dari dana publik yaitu dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut proses pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara pada khususnya pemerintah telah mengupayakan beberapa peraturan-peraturan yang diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011. Kelima peraturan ini merupakan produk pemerintah sebagai wujud sebagai kehendak untuk melaksanakan reformasi dibidang pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Negara dan telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* disatu sisi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat / *stake-holder*.

Pengelolaan aset negara dalam bentuk laporan Barang Milik Negara yang akuntabel, akurat dan transparan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bisa mengambil kebijakan dalam mengendalikan, mengawasi dan mengelola aset yang terdapat di instansi masing-masing serta berkontribusi untuk pembuatan neraca keuangan pemerintah pusat pada semester ataupun laporan akhir tahun yaitu pada Akun Aset Lancar dan Aset Tetap. Laporan Keuangan berupa neraca tersebut perlu diperhatikan karena laporan keuangan bukan hanya sebagai suatu kewajiban belaka namun lebih menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dan menentukan dalam pengambilan kebijakan para pimpinan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pimpinan kantor per periode tahun anggaran merupakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang merupakan tanggung jawab pimpinan yang bersangkutan. Untuk itu pimpinan harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah Kuasa Pengguna Anggaran membuat laporan Keuangan setiap periode tahun anggaran, maka untuk keandalan dan ke keandalan data yang telah disajikan, maka akan dilakukan evaluasi ataupun revidi oleh Inspektorat sebagai internal auditor. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa revidi atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Satuan Kerja sebelum Kepala Satuan Kerja menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan kemudian menyampaikannya LKPP tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini audit.

Pemerintah sebagai agen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil dari prinsipal mempunyai pola hubungan yang tak terpisahkan, tetapi terdapat ketidak seimbangan pemilikan informasi. DPR tidak punya informasi secara penuh tentang laporan pertanggungjawaban eksekutif atas pengelolaan anggaran apakah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran telah mencerminkan kondisi sesungguhnya, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian interen yang memadai, dan telah melakukan pengungkapan secara penuh atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut. Untuk meyakini kebenaran pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari pihak eksekutif, dibutuhkan pihak yang berkompeten dan independen untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban yang disajikan. Pihak-pihak yang berkompeten yaitu internal auditor pemerintah (Inspektorat) dan eksternal auditor (BPK).

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara yang didalamnya laporan Barang Milik Negara, sebab hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPR dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya yaitu Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Dalam siklus anggaran, pengawasan terhadap keuangan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (Tjandra, 2009 : 130), baik pengawasan internal maupun eksternal dalam hal ini pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan oleh BPK akan ditindaklanjuti dengan pemberian opini terhadap kementerian/ lembaga yang diperiksa pada setiap tahun anggaran. Oleh sebab itu untuk mendapatkan opini yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk itu Pengelolaan BMN yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan harus dilakukan dengan tertib sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai sebagai salah satu lembaga pemerintahan pusat mempunyai kedudukan sebagai pengguna barang (PB). Sesuai Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 160/KEP-5.41/III/2013 tanggal 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan

Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Tahun Anggaran 2013, sebagian kewenangan tersebut diteruskan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) agar dapat melakukan tugas pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya meliputi :

1. perencanaan kebutuhan BMN untuk satuan kerjanya dan melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. penggunaan barang dalam rangka mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaan satuan kerjanya termasuk pemeliharaan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
3. pemanfaatan BMN yang tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya dalam bentuk sewa atau kerja sama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan, terhadap sebagian tanah dan/ atau bangunan atau selain tanah/ bangunan;
4. penghapusan BMN dari Daftar Kuasa Pengguna Barang setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Kepala BPN RI;
5. penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengusulkan Penetapan status barang kepada pihak pengelola barang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Dirjen Kekayaan Negara.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, terdapat permasalahan yang muncul dari pihak pembuat Laporan Keuangan maupun masalah yang terjadi dalam Kantor itu sendiri.

Permasalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan barang Milik Negara bisa terjadi dalam hal Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan maupun dalam penyusunan Laporan Keuangan, Etika para pegawai dalam menerapkan kepatuhan terhadap kode etik pegawai yang menjadi suatu permasalahan dalam mengelola Barang milik Negara. Jika hal ini dibiarkan saja, akan berpengaruh pada penilaian Laporan Keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin setiap Tahun Anggaran karena ketidak patuhannya terhadap etika dalam pembuatan laporan keuangan.

Penelitian *Brown dan Raghunandan* menyebutkan bahwa kualitas reviu pada sektor publik lebih rendah dibandingkan kualitas reviu pada sektor swasta. Rendahnya kualitas reviu pada sektor publik karena *litigation risk* yang rendah. Sehingga penulis mencoba membuat penelitian ini untuk mengkaji kualitas pribadi masing-masing individu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Etika sangat diperlukan dalam melakukan sebuah pekerjaan, karena akan mempengaruhi dari hasil sebuah pekerjaan tersebut. Menurut Ricky W. Griffin

dan Ronald J. Ebert (2006:58) pengertian “etika” merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Aparatur pemerintah pada dasarnya adalah pelayan publik yang memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat dalam pengaturan dan pelayanan kebutuhan publik. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dalam melayani pelayanan kepada masyarakat harus menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum norma sosial atau dengan kata lain penggunaan atau penerapan standar etika yang telah ada sebagai tanggung jawab aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah aparatur pelayanan publik telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika yang salah satunya adalah memberikan transparansi, jujur, dan akuntabel dalam sebuah pelaporan keuangan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini yang seharusnya dicapai oleh pelayan publik sehingga masyarakat puas akan kinerja yang telah dilaporkannya.

Pengalaman ialah sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung dan sebagainya) bisa berupa peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk (KBBI, 2005). Pengalaman adalah guru yang terbaik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman dapat dijadikan

sebagai sumber pengetahuan, atau pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Pendapat lain mengenai pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu (Trijoko, 1980). Menurut Ranupandojo, (1984) mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pegawai dalam membuat sebuah laporan keuangan dapat dijadikan pengetahuan dan informasi. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman pegawai dalam membuat sebuah laporan keuangan akan ikut mematangkan pegawai yang bersangkutan untuk menghadapi masalah-masalahnya. Pengalaman yang dilalui pegawai akan membantu yang bersangkutan untuk menentukan langkah-langkah tertentu yang dapat menunjang keberhasilan kerja demikian juga hal-hal yang harus dihindari karena akan menjadi penghambat kerjanya atau mungkin sengaja memperlambat pekerjaan karena sesuatu alasan tertentu padahal yang bersangkutan tahu kapan dan bagaimana tugas tersebut selesai.

Untuk Memperoleh Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dalam membuat laporan keuangan. menurut Boulter *et.al* (1996) level kompetensi adalah sebagai berikut : *Skill*,



*Knowledge, Self-concept, Self image, Trait* dan *Motive*. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas dengan baik misalnya seorang pengelola Barang Milik Negara. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang khusus (tertentu), misalnya bahasa akuntansi. Social role adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam masyarakat (ekspresi nilai-nilai dari), misalnya: pemimpin, Self Image adalah pandangan orang terhadap diri sendiri, merefleksikan identitas contoh: melihat diri sendiri sebagai seorang ahli. Trait adalah karakteristik abadi dari seseorang yang membuat orang untuk berperilaku, misalnya: percaya diri sendiri. Motivasi adalah suatu dorongan seseorang secara konstitusi berperilaku, sebab perilaku seperti tersebut kenyamanan, contoh: prestasi membuat laporan. Dari uraian tersebut maka sangat dibutuhkan pegawai untuk mempunyai kompetensi dimana kualitas individu tersebut akan menghasilkan kesuksesan dalam pekerjaannya.

Sedangkan BPN RI sendiri dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan dalam opini dari BPK RI dalam pembuatan laporan keuangan, dimulai dari tahun 2009 mendapat opini *Disclaimer*, tahun 2010 dan 2011 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), tahun 2012 mendapat opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), dan yang terakhir tahun 2013 BPN RI mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tentu dalam capaian yang luar biasa itu terdapat kontribusi pegawai-pegawai pengelola laporan keuangan salah satunya Pengelola Aset Barang Milik Negara, namun dalam lima tahun terakhir terdapat dinamika yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas tersebut seperti etika

dalam bekerja, kompetensi dan pengalaman dalam membuat laporan keuangan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti aparatur pemerintah yang bertugas sebagai Petugas Pengelola Barang Milik Negara bagaimana kepiawaian dalam mengelola aset negara sesuai dengan standar etika (moral) yang bersikap jujur dan bagaimana Kompetensi yang dimiliki yang ditunjang dengan Pengalamannya dalam mengelola aset negara sehingga menghasilkan kualitas laporan Barang Milik Negara pada khususnya dan Laporan Keuangan pada umumnya yang mamadai nantinya dapat disikapi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait seperti Inspektorat, BPK dan DPR atau penegak hukum lainnya. Untuk mendukung Laporan Keuangan Yang Handal, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerjasama dengan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membentuk pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat judul penelitian

**“ Pengaruh Etika, Kompetensi, Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menyebabkan Laporan Keuangan itu menjadi baik atau buruk, diantaranya adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik,

Etika pegawai, lingkungan kerja, pendidikan, pelatihan, supervisi, loyalitas, adanya pembagian kerja yang baik, pendelegasian wewenang yang tepat, gaya kepemimpinan atasan dan lain-lain.

2. Kurangnya Pengalaman, Kompetensi pegawai dapat menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah tersebut menjadi tidak bagus atau dapat dibilang kurang maksimal.
3. Kode Etik Pegawai yang belum dilaksanakan secara baik.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh etika dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat?
2. Apakah ada pengaruh kompetensi dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat?
3. Apakah ada pengaruh pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat?
4. Apakah ada pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Etika Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompetensi Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara simultan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Aspek Praktis**

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan atas teori-teori yang telah ada.

- c. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

## **2. Aspek Akademis**

- 1) Bagi Badan Pertanahan Nasional RI di Lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis Pengelolaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bagi Peneliti Sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.
- 3) Bagi Peneliti Baru sebagai bahan referensi bagi peneitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Etika, Kompetensi, dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Negara terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada setiap Tahun Anggaran dan memberikan Opini terhadap Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat (LKPP), LK Kementrian/ Lembaga (LKKL), LK Pemerintah Daerah (LKPD), LK Badan Usaha Milik Negara dan LK Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Menurut Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/9/2012 tentang jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan, BPK dapat memberikan opini WTP dengan paragraf penjas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai modifikasi dari opini WTP.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Tidak Wajar memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas beberapa hal yaitu :

1. Sistem Pengendalian Intern.

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian Intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI meliputi lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif bila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan berupa laporan kepatuhan. Laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.



### 3. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Selanjutnya BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 17 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Untuk Mendapatkan opini WTP tersebut dari BPK para pembuat Laporan Keuangan haruslah harus ekstra kerja keras untuk menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu dengan cara patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan kecukupan data untuk diungkap dalam laporan keuangan dengan tidak menimbulkan suatu pertanyaan bagi pihak Inspektorat maupun BPK dan yang lebih penting adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kuasa

pengguna Anggaran atas dana yang dipercayakan dari rakyat untuk dikelola dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Nilai Aset yang terdapat dalam Neraca Keuangan antara lain didapatkan dari Laporan Barang Milik Negara.

Menurut Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 1, Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.

Laporan BMN disusun setiap semester sehingga dalam satu tahun anggaran, disusun 3 (tiga) macam Laporan BMN yaitu Laporan Semester 1, Laporan Semester 2 dan Laporan Tahunan.

Laporan BMN merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang disusun setiap satu semester. Pada akhir semester harus dilakukan rekonsiliasi pada data BMN dengan data Keuangan. Dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, rekonsiliasi Barang Milik Negara adalah proses pencocokan laporan nilai BMN dengan nilai yang dikeluarkan dengan APBN atau antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber yang sama. Meskipun rekonsiliasi dapat menjamin kecocokan data yang diproses, proses rekonsiliasi tidak menggugurkan kewajiban penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan.

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas maka dilakukan Rekonsiliasi yang dilakukan pada Neraca BMN dengan Neraca Keuangan secara internal tiap Instansi (Rekonsiliasi Internal). Rekonsiliasi internal dilakukan dengan mencocokkan nilai BMN pada neraca BMN dengan nilai BMN pada neraca keuangan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester pada tingkat satuan kerja, wilayah, eselon 1 dan Pengguna Barang.

Setelah dilakukan rekonsiliasi internal, baru dilakukan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi dengan KPKNL untuk tingkat satuan kerja dan Rekonsiliasi dengan DJKN untuk tingkat wilayah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pemutakhiran data adalah kegiatan *up-date* data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-

unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.

Pada tingkat satuan kerja, laporan yang disusun merupakan Laporan BMN tingkat Unit Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Laporan BMN disusun setiap satu semester. Pada akhir semester UAKPB (Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota) melakukan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL, selanjutnya data hasil rekonsiliasi dikirimkan ke tingkat UAPPB-W (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi) dan dikirimkan juga ke UAKPA untuk rekonsiliasi internal dalam rangka menyusun Neraca Keuangan. Data yang diterima oleh UAPPB-W digunakan untuk menyusun laporan BMN tingkat Wilayah. Setelah tersusun, dilakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-W, rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya dikirimkan ke Unit Eselon I BPN. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi dengan DJKN dan rekonsiliasi internal dengan UAPPA-E1 dan dilaporkan ke UAPB.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala satuan kerja bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Menurut Masmudi (2003:77) definisi laporan keuangan adalah

“Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.

Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai:

1. Pengurusan dan ketaatan
2. Kondisi keuangan
3. Kinerja
4. Dampak ekonomi

Adapun definisi laporan keuangan menurut Zaki Baridwan (2000: 17)

“ Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan ”

Dari kedua pengertian dari laporan keuangan menurut Masmudi dan Zaki Baridwan tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan Indra Bastian (2006:48): dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna
2. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)
3. kualitas sekunder; konsisten, komparatif
4. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*Understandability*), relevansi (*Relevance*), keterandalan (*Reliable*) dan dapat diperbandingkan (*Comparability*).

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat difahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

1. Alasan dibuatnya laporan keuangan:
  - a. Internal
    - i. Alat pengendalian;
    - ii. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi;
  - b. Eksternal
    - i. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
    - ii. Dasar pengambilan keputusan.
2. Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk:
  - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

- b. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi);
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Laporan Realisasi Anggaran;
- e. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto;

Indikator laporan keuangan sektor public yang berkualitas, menurut *Government Accounting Standard Board* (2009:54) adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, laporan keuangan menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
2. Hasil operasi yang dikerjakan satu periode penuh memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan sehingga mendapatkan Opini dari Audit eksternal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. laporan kondisi keuangan dapat disajikan secara transparan dapat dipahami dengan mudah, dan dipertanggungjawabkan
4. Melaporkan kondisi sumberdaya jangka panjang yang dapat membantu dalam mengambil keputusan, dan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya

## **2. Etika**

Sikap pandang dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang berinteraksi dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam profesinya, tak terkecuali profesi sebagai seorang pengelola aset. Interaksi ini menghasilkan suatu sikap dan



orientasi etika yang baru, yang nantinya akan menentukan tindakan atau keputusannya sebagai pengelola aset dalam masalah etika.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas dalam melakukan suatu tindakan. Sebagitjauh kemudian etika memberikan pedoman bagi seseorang atau komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambil. Sebuah etika, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep diri dari sistem nilai yang ada pada pengelola aset sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai di luar dirinya. Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku etikanya, sesuai dengan peran yang disandangnya. Menurut Cohen et al.(1980:171), setiap tindakan individu pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, setelah berinteraksi dengan pengalaman- pengalaman pribadi dan sistem nilai individu, akan menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam setiap perilakunya, sebelum akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Masalah etika merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam profesi akuntansi karena akuntansi memiliki dua tuan yang harus dilayaninya, yaitu klien dan masyarakat/publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar/*fair* (Shaub: 1993:146). Pendapat ini didukung oleh Wahyudi Prakarsa yang menyatakan bahwa seorang auditor memikul tanggung jawab ganda, pertama kepada para nasabah/klien yang membayar *fee* untuk pekerjaan

profesional yang dilakukan, dan kedua kepada publik untuk melaporkan *fairness* dari laporan keuangan.

Beberapa peneliti menemukan bahwa perilaku etis dipengaruhi secara signifikan oleh pihak lain yang dihadapi dalam lingkungan profesinya tanpa memperhatikan apakah perilakunya sesuai dengan kode etik atau tidak. Tingkat pengaruh itu mungkin dipengaruhi oleh kedekatan hubungan antara organisasi dengan pihak lain yang berkaitan, dengan pihak yang berkuasa baik dari dalam organisasi, seperti pimpinan organisasi maupun di luar organisasi, seperti pemerintah, Kantor Akuntan lain, dan sebagainya (Finn et al. 1988:25). Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Shaub dan Finn (1993:146) menunjukkan bahwa orientasi etika (yang dibentuk oleh lingkungan budaya dan pengalaman pribadi) tidak hanya berpengaruh terhadap sensitivitas etika pengelola aset namun juga berpengaruh terhadap tingkat komitmen organisasi maupun komitmen profesinya.

Indikator Etika Pengelola Aset Barang Milik Negara sebagai berikut :

1. Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab.
2. Berperilaku sesuai Etika
3. Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi.
4. Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan.

### 3. Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh secara langsung lewat pengalaman atau praktik, atau dapat dihasilkan dari pengalaman tidak langsung seperti membaca.

Menurut Robbins (2003):

*“Experience may be accured directly through observation or practice, or it may be accured indirectly, as through reading”*

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman.

Sehubungan dengan pengalaman seorang auditor, pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. (Ida Suraida, 2003). Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kematangan seseorang, dalam arti ia dapat memperoleh pelajaran dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hal ini akan mendorongnya bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman, diskusi mengenai pengelolaan BMN dengan rekan sekerja, pengawasan dan *review* oleh inspektorat, mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan BMN. Dari uraian

tersebut di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan point penting dalam mengetahui indikator dalam sebuah pengalaman bekerja yaitu sebagai berikut :

1. Lama Bekerja.
2. Kompleksitas masalah/persoalan.
3. Kontinuitas pekerjaan.
4. Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan.

#### **4. Kompetensi**

Yang dimaksud dengan variabel kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang pegawai sebagai hasil dari pendidikan formal, keikutsertaan dalam pelatihan, seminar simposium dan lain-lain. (Ida Suraida, 2005). Kompetensi para pengelola aset diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan diharapkan pengelola Aset BMN yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melakukan tugasnya.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, pengelola BMN harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Dalam penelitian juga disimpulkan bahwa program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian dalam pembuatan Laporan Keuangan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan para pembuat pelaporan keuangan untuk mengetahui kekeliruan yang ada di satuan kerja yang menjadi kliennya. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa

pelatihan yang dilakukan oleh pembuat laporan keuangan BMN akan meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola aset. Kecakapan dalam membuat laporan keuangan BMN dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pembuat laporan keuangan. Jenjang kecakapan pegawai dalam bekerja yang kemudian dijadikan indikator-indikator kompetensi oleh peneliti disusun sebagai berikut:

1. Menyelesaikan tugas kerja secara konsisten dan tepat waktu
2. Mampu membuat keputusan yang tepat dengan taat peraturan yang berlaku
3. Menyukai bekerja secara Tim

## **B. Kerangka Berpikir**

Etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu. Aturan etika menjelaskan kapan suatu perilaku dapat diterima dan kapan suatu perilaku tidak dapat diterima atau dianggap salah. Etika sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasar antar manusia, dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang bermoral. Moral adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas atau fungsi yang diharuskan kelompoknya serta loyalitas pada kelompoknya (Sukanto, 1991:2). Menurut Shaub (1993:146) perilaku etis seorang yang mempunyai profesi tidak hanya ditentukan oleh aturan kode etik profesinya, tetapi juga oleh lingkungan budaya, lingkungan profesi, lingkungan organisasi, serta pengalaman-

pengalaman pribadinya. Faktor psikologikal yang diberikan oleh lingkungan dan budaya kerja pada seorang pegawai membentuk motivasi dalam melakukan pembuatan laporan keuangan secara jujur, transparan, dan tanggungjawab. Sikap Mental dan etika yang baik dalam pembuatan laporan keuangan akan memberikan nilai tambah untuk laporan keuangan. Sebaliknya dengan sikap mental dan etika yang buruk dalam pembuatan laporan keuangan akan memberikan citra negatif untuk laporan keuangan.

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian dalam membuat sesuatu bentuk atau pekerjaan sesuai dengan *skill* dan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang dimiliki dari pendidikan *formal* maupun *informal* yang akan membentuk sikap profesional dalam bekerja. Diharapkan dengan sikap profesional, laporan keuangan yang dibuat akan memiliki kualitas yang sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dan menjadi pertanggungjawaban kepada pimpinan dan para pemilik kepentingan di eksternal seperti BPK RI, KPK, dan DPR. Oleh karena itu, untuk memiliki laporan keuangan yang berkualitas diharapkan menugaskan kepada para pegawai profesional yang memiliki kompetensi dalam membuat laporan keuangan.

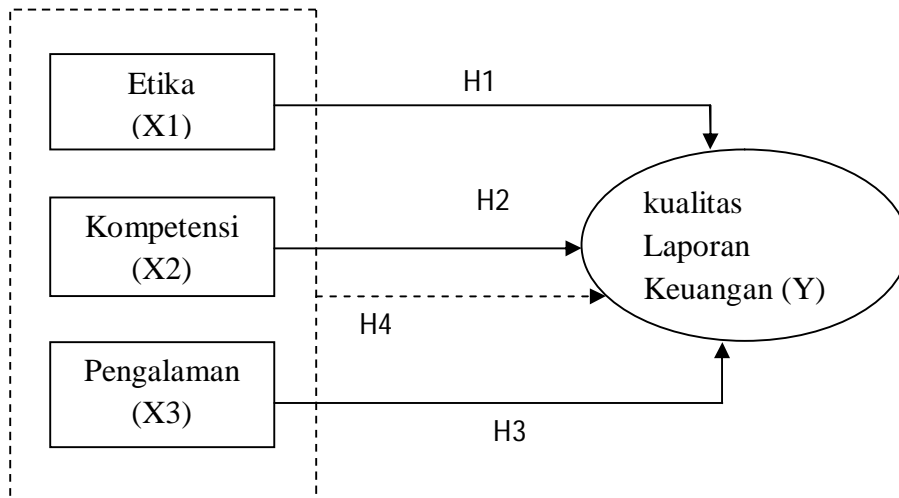
Para pegawai yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan laporan keuangan akan menjadi terampil dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang setiap hari tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan pekerjaannya, selain hal tersebut orang yang berpengalaman akan

senantiasa belajar dari kesalahan dan tidak terlalu gugup, tegang, dalam menghadapi suatu masalah yang dijumpainya dalam pengerjaan tugas menjadikan laporan keuangan dikerjakan akan menghasilkan Laporan yang berkualitas dan cepat. Berbeda dengan pegawai yang belum cukup berpengalaman dalam pembuatan laporan keuangan, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas yang diperoleh menjadi tidak maksimal dan waktu yang dikerjakan menjadi semakin lama karena kurang cukup pengalaman dan gugup dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapinya.

Etika, Kompetensi, dan pengalaman adalah satu kesatuan yang mampu memberikan hasil yang positif pada proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Apabila ketiga faktor tersebut di implementasikan kepada setiap instansi pemerintah, maka akan dihasilkan sebuah Laporan Keuangan yang bermutu baik dan diharapkan menjadi Laporan Keuangan yang berkualitas pula. Hal ini dilakukan untuk dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat atas dana yang digunakan berasal dari pajak maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **C. Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu Etika dalam mengelola Barang Milik Negara ( $X_1$ ), Kompetensi dalam mengelola Barang Milik Negara ( $X_2$ ), dan Pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikatnya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( $Y$ ). sebagaimana paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan :

$X_1$  : Variabel bebas 1, yaitu Etika

$X_2$  : Variabel bebas 2, yaitu Kompetensi

$X_3$  : Variabel bebas 3, yaitu Pengalaman

Y : Variabel terikat, yaitu Kualitas Laporan Keuangan

H<sub>1</sub> : Pengaruh Etika ( $X_1$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

H<sub>2</sub> : Pengaruh Kompetensi ( $X_2$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

H<sub>3</sub> : Pengaruh Pengalaman ( $X_3$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

H<sub>4</sub> : Pengaruh Etika ( $X_1$ ), Kompetensi ( $X_2$ ), dan Pengalaman ( $X_3$ ) dalam mengelola Barang Milik Negara secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Pusat (Y).



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, maka diformulasikan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh etika dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.
2. Ada pengaruh Kompetensi dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.
3. Ada pengaruh Pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.
4. Ada pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) Minggu dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014.

##### **B. Tempat Penelitian**

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **C. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan penelitian *ex-post facto*. *Ex-post facto* yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independen). (Nur Indriantoro, 2009 : 27). Dalam penelitian ini Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai variabel yang dipengaruhi, serta etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara sebagai variabel yang mempengaruhi.

Berdasarkan tingkat penjelasan kedudukan variabel, penelitian ini digolongkan dalam penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono penelitian

asosiatif kausal merupakan "Penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)." (Sugiyono, 2008 : 5). Dalam penelitian ini kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Y) dipengaruhi oleh Etika ( $X_1$ ), Kompetensi ( $X_2$ ) dan Pengalaman ( $X_3$ ).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *survey* dengan pengambilan sensus dan bersifat non eksperimental. sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*), karena untuk menjelaskan hubungan kausal dan korelasional antar variabel melalui pengujian hipotesis.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran ( Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengelola Barang Milik Negara.

##### **2. Objek Penelitian**

Obyek penelitian adalah variabel yang diamati. Berdasarkan konsep tersebut maka obyek penelitian variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Etika, kompetensi,

dan pengalaman. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengelola Barang Milik Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Variabel Penelitian**

Variabel Independend atau variable bebas pada penelitian ini adalah Etika sebagai  $X_1$ , Kompetensi sebagai  $X_2$ , dan Pengalaman sebagai  $X_3$ . Sedangkan Variabel dependend atau variabel terikat pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai  $Y$ .

#### **F. Operasionalisasi Variabel**

Definisi Operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusal masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab (J. Supranto, hal 322,2003). Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel (Singarimbun, hal 25,1995). Setiap indikator dari variabel penelitian ini dijabarkan ke dalam sebuah pertanyaan tertutup dan menuangkannya dalam daftar pertanyaan. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu data kuantitatif adalah *Summated Rating Method : The Likert Scale*, yang merupakan suatu pengukuran skala ordinal. Teknik pengukuran ini digunakan karena teknik ini tidak menuntut penggunaan

kategori, dan objek diukur tidak terbatas pada dua alternatif jawaban saja. Skor untuk penilaian kedua variabel dihitung dengan kriteria *5 point scale : agreement/disagreement*.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Etika ( $X_1$ ), Kompetensi ( $X_2$ ), Pengalaman ( $X_3$ ), yang merupakan variabel independen.
2. Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Pusat (Y) sebagai variabel dependen.

Berikut ini akan dijelaskan batasan variabel penelitian dan indikatornya beserta skala pengukuran yang digunakan, seperti dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat (Y)	Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan  (Zaki Baridwan,2000)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya.</li> <li>2. Melaporkan Hasil Operasi.</li> <li>3. Melaporkan kondisi keuangan.</li> <li>4. Melaporkan Sumberdaya jangka panjang</li> </ol>	Ordinal

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Etika (X <sub>1</sub> )	Nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab.</li> <li>2. Berperilaku sesuai kode Etik</li> <li>3. Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi.</li> <li>4. Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan</li> </ol>	Ordinal
Kompetensi (X <sub>2</sub> )	Kompetensi adalah keahlian professional yang dimiliki oleh pengelola BMN sebagai hasil dari pendidikan formal maupun keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan, symposium dan seminar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelesaikan tugas kerja secara konsisten dan tepat waktu</li> <li>2. Mampu membuat keputusan yang tepat dengan taat peraturan yang berlaku</li> <li>3. Menyukai bekerja secara Tim</li> </ol>	Ordinal
Pengalaman (X <sub>3</sub> )	Pengalaman adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lama Bekerja</li> <li>2. Kompleksitas masalah/persoalan</li> <li>3. Kontinuitas pekerjaan</li> <li>4. Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan</li> </ol>	Ordinal

Sumber : Data Primer Diolah 2014

## G. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi Penelitian

Pengertian Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sehingga populasi tidak hanya orang tetapi juga benda – benda alam lain serta keseluruhan jumlah objek dan karakteristik objek itu. (Sugiyono, 2008 : 115). Berdasarkan pengertian Populasi tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Sampel Penelitian**

Sampel menurut Sugiyono (2008 : 73) adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut”.

Penarikan sampel ditujukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel merupakan perwakilan dari populasi penelitian. Dengan adanya sampel, maka waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh peneliti menjadi lebih efisien.

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun dan mempunyai tupoksi sebagai Pengelola Aset Barang Milik Negara saja.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner. “Angket/kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. (Suharsimi Arikunto, 2006: 151). Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut sudah cukup terperinci dan lengkap sehingga peneliti bisa mendapatkan data dan informasi dari responden mengenai Etika, Kompetensi, dan Pengalaman dalam mengelola Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **I. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008: 146). Melalui penelitian lapangan, diharapkan dapat diperoleh data primer, yaitu data yang langsung didapat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini dilakukan dengan menyusun kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan dan pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada para responden.



## 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Adapun kisi-kisi instrumen penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item	Sumber Data
1	Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Y)	1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya. 2. Melaporkan Hasil Operasi. 3. Melaporkan kondisi keuangan. 4. Melaporkan Sumberdaya jangka panjang	4, 7, 5, 8, 10 3, 6, 9 1, 2	Pegawai
2	Etika (X <sub>1</sub> )	1. Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab. 2. Berperilaku sesuai kode Etik 3. Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi. 4. Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan	1, 3, 2, 4, 6, 5, 9, 7, 8, 10	Pegawai
3	Kompetensi (X <sub>2</sub> )	1. Menyelesaikan tugas kerja secara konsisten dan tepat waktu 2. Mampu membuat keputusan yang tepat dengan taat peraturan yang berlaku 3. Menyukai bekerja secara Tim	2, 3, 8, 9, 1, 5, 6, 7 4, 10	Pegawai
4	Pengalaman (X <sub>3</sub> )	1. Lama Bekerja 2. Kompleksitas masalah/persoalan 3. Kontinuitas pekerjaan 4. Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan	1, 2, 8, 3, 10 6, 9 4, 5, 7,	Pegawai

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Penetapan skor diberikan kepada butir instrumen. Pemberian skor terhadap butir-butir pernyataan akan diukur menggunakan skala likert berdimensi 5 seperti yang telah tertera di bawah ini:

Tabel 3 : Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	Skor untuk Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: Data primer yang diolah 2014

## 2. Uji Coba Instrumen

Data penelitian ini diperoleh dengan cara menyerahkan daftar pertanyaan kepada responden melalui kuesioner, jawaban dari para responden atas pertanyaan tersebut merupakan ukuran yang akan diuji. Data yang diperoleh dari para responden perlu di uji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-pengujian terhadap alat ukur tersebut. Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan adalah sebagai berikut

## 1) Uji Validitas dan Realibilitas (*Test of Validity and Realibility*)

### a. Uji Validitas

Menurut Marsun yang dikutip oleh Sugiyono (2008 : 124) menyatakan teknik korelasi untuk menganalisis validitas item, sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Item mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut memiliki validitas yang tinggi pula. Syarat minimum adalah apabila  $r = 0,3$ . jadi kalau korelasi terjadi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dengan menggunakan rumus *Product Moment of Corelation*, yang mana rumusnya sebagai berikut :

$$r = \frac{N \cdot (\sum xy) - (\sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r$  = Koefisien korelasi

$X$  = Nilai dari butir (X)

$Y$  = Nilai dari total butir (Y)

$N$  = Banyaknya butir

Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pengujian item / butir instrumen dinyatakan valid, sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pengujian item /

butir instrument tidak valid. Item pertanyaan yang memiliki  $r$  hitung lebih besar dari taraf signifikansi 5% dianggap tidak valid. Sedangkan item yang mempunyai  $r$  hitung lebih kecil dari 5% dianggap valid (Joko Sulisty, 2010). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus *product moment* untuk  $N$  sebanyak 35 dengan taraf signifikansi 5%. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan *SPSS versi 19* dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4 : Rangkuman Uji Validitas Variabel

No	Variabel	Indikator	Nomer Valid	Nomor Gugur
1	Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Y)	1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya. 2. Melaporkan Hasil Operasi. 3. Melaporkan kondisi keuangan. 4. Melaporkan Sumberdaya jangka panjang	4, 7, 5, 8, 10 3, 6, 9 1, 2	
2	Etika (X <sub>1</sub> )	1. Bekerja dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab. 2. Berperilaku sesuai kode Etik 3. Menjaga nama baik kepada pribadi, atasan, dan instansi. 4. Menjunjung tinggi moral dalam melakukan pekerjaan	1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 10	6 9

No	Variabel	Indikator	Nomer Valid	Nomor Gugur
3	Kompetensi (X <sub>2</sub> )	1. Menyelesaikan tugas kerja secara konsisten dan tepat waktu 2. Mampu membuat keputusan yang tepat dengan taat peraturan yang berlaku 3. Menyukai bekerja secara Tim	3, 8, 9,  1, 5, 6, 7  4, 10	2
4	Pengalaman (X <sub>3</sub> )	1. Lama Bekerja 2. Kompleksitas masalah/persoalan 3. Kontinuitas pekerjaan 4. Jumlah Pekerjaan yang dikerjakan	1, 2, 8, 3, 10  6,  4, 7,	9  5

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Keterangan :

- 1) Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Uji validitas yang dilakukan pada 35 responden menggunakan program SPSS versi 19. Dari hasil pengujian tersebut maka diperoleh hasil bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari 10 item dinyatakan valid.

- 2) Hasil Uji Validitas Variabel Etika.

Uji validitas yang dilakukan pada 35 responden menggunakan program SPSS versi 19. Dari hasil pengujian tersebut maka diperoleh

hasil bahwa variabel Etika yang terdiri dari 10 item dinyatakan valid sebanyak 8 item dan gugur 2 item.

### 3) Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi

Uji validitas yang dilakukan pada 35 responden menggunakan program SPSS versi 19. Dari hasil pengujian tersebut maka diperoleh hasil bahwa variabel Kompetensi yang terdiri dari 10 item dinyatakan valid sebanyak 9 item dan gugur 1 item.

### 4) Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman

Uji validitas yang dilakukan pada 35 responden menggunakan program SPSS versi 19. Dari hasil pengujian tersebut maka diperoleh hasil bahwa variabel Pengalaman yang terdiri dari 10 item dinyatakan valid sebanyak 8 item dan gugur 2 item.

## **b. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Imam Ghazali, 2009: 45). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data memberikan hasil yang relatif konsisten bila dilakukan pengukuran ulang subyek yang sama. Fungsi dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana keterandalan alat ukur atau questioner tersebut.

Pengukuran reliabilitas ini menggunakan rumus alpha, dengan formula sebagai berikut (Arikunto, 2000 : 224)

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana:

$r_{11}$  = reliabilitas instrument

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_1^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma_1^2$  = Varians total

Dengan ketentuan, hasil uji reliabilitas akan dinyatakan benar-benar reliabel jika  $r$  yang dihasilkannya  $\geq 0,6$  (Arikunto, 2000 : 225). Digunakan taraf signifikan 5%.

Tabel 5 : Rangkuman Uji Reliabilitas Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Etika	0,812	Sangat tinggi
2	Kompetensi	0,821	Sangat tinggi
3	Pengalaman	0,776	Tinggi
4	Kualitas Laporan Keuangan	0,897	Sangat tinggi

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Berdasarkan Tabel 5 (Hasil Uji Reliabilitas) di atas, dapat dilihat bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* semua variabel di atas 0,60 yaitu Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,897 , Etika sebesar 0,812,

Kompetensi sebesar 0,821, dan Pengalaman sebesar 0,776. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi pada variabel etika, pengalaman, dan kualitas laporan keuangan dan untuk variabel kompetensi memiliki tingkat reliabilitas dengan kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya untuk di analisis

## **J. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman (X) terhadap kualitas Laporan keuangan (Y) agar model regresi yang dirumuskan dapat diterapkan maka beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu (Algifari, 2000 : 83)

#### **a. Uji Normalitas**

Bahwa untuk dua variabel yang didistribusikan secara normal kovarian atau korelasi nol berarti dua variabel tadi independen (bebas). Pengujian terhadap normalitas menggunakan uji *chi – square goodness of fit*, dengan rumus :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Dimana :

$O_i$  = frekuensi pengamatan pada kelas / interval i



$E_i$  = frekuensi yang diharapkan pada kelas I didasarkan pada distribusi hipotesis, yaitu distribusi normal

Jika nilai  $X^2_{\text{statistik}} \leq \text{nilai } X^2_{\text{tabel}}$ , maka data terdistribusi normal.

Jika  $X^2_{\text{statistik}} \geq \text{nilai } X^2_{\text{tabel}}$ , maka data terdistribusi tidak normal.

#### **b. Uji Linieritas**

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Uji ini juga digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang linear jika kenaikan skor variabel independen diikuti kenaikan skor variabel dependen. (Imam Ghozali, 2009: 152).

$$F_{\text{reg}} = Rk_{\text{reg}}/Rk_{\text{res}}$$

Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  = Harga bilangan F untuk regresi

$Rk_{\text{reg}}$  = Rerata kuadrat garis regresi

$Rk_{\text{res}}$  = Rerata kuadrat garis residu

Data mempunyai hubungan linier jika  $\text{sig} > 0,05$   
(Sutrisno Hadi, 2004).

### c. Uji Multikolinearitas

Antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat korelasi antara variabel independen, yaitu dengan cara menentukan koefisien korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain.

Jika diantara variabel independen terdapat korelasi +1 atau -1, maka dipastikan bahwa persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Menghilangkan adanya multikolinearitas pada suatu model regresi yaitu dengan menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi, artinya mengeluarkan variabel independen dari model regresi yang secara teoritis variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen. Adanya multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Batas VIF adalah 5, jika VIF diatas 5 maka terjadi gejala multikolinearitas.

### d. Uji Heteroskedasitas

Bahwa varians setiap Etika, Kompetensi, dan Pengalaman tidak tergantung dari variabel yang menjelaskan. Adanya heteroskedasitas pada suatu regresi dilakukan dengan menggunakan pengujian Korelasi rangking Spearman ( $r_s$ ), dengan rumus :

$$r_s = 1 - 6 \left[ \frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right]$$

Dimana :

$d_i$  = selisih ranking standar deviasi (S) dan ranking nilai mutlak error (e). Nilai e = Y-Y

N = banyaknya sampel

Pengujian ini yaitu menggunakan distribusi t dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka pengujian menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak terdapat heteroskedasitas pada model regresi. Nilai  $t_{hitung}$  dapat ditentukan dengan rumus :

$$t = \frac{r_s \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

## 2. Analisis Statistik Induktif (Inferensial)

Statistik induktif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini digunakan bila sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau acak (Sugiyono, 1999 : 143). Disini menggunakan regresi linier berganda.

### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dipergunakan untuk beberapa variabel pengaruh (X) terhadap variabel tergantung (Y) dengan model linier. Dalam penelitian ini, analisis linier berganda dipergunakan untuk menguji pengaruh etika ( $X_1$ ), kompetensi ( $X_2$ ) dan pengalaman ( $X_3$ ) terhadap kualitas Laporan Keuangan (Y). bentuk umum persamaannya adalah (Aligifari, 2000 : 62)

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Nilai estimasi Y / kualitas Laporan Keuangan (Y)

a = Konstanta

$X_1 X_2 X_3$  = Nilai variabel independen  $X_1 X_2 X_3$

$b_1 b_2 b_3$  = koefisien regresi

e = *error term*

### b. Pengujian Hipotesis

#### 1) Uji F

F-test untuk menguji pengaruh simultan (bersama), dengan rumus: (Sugiyono, 1999 : 198).

$$F = \frac{\text{Varian Terbesar}}{\text{Varian Terkecil}}$$

- a)  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol ( $H_0$ ), artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa semua variabel independen  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan nilai variabel dependen ( $Y$ ).
- b)  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ) artinya secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel dependen ( $Y$ ).

## 2) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5%.

### c. Analisis Koefisien determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  adalah perbandingan antara variasi  $Y$  yang dijelaskan oleh  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  secara bersama-sama dibanding dengan variasi total  $Y$ . Uji  $R^2$  atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ( $R^2 = 0$ ), artinya variasi dari  $Y$  tidak dapat diterangkan oleh  $X$  sama sekali. Sementara bila  $R^2 = 1$ , artinya variasi dari  $Y$  secara

keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  $R^2 = 1$ , maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh  $R^2$  nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

#### **d. Sumbangan Relatif (SR%)**

Sumbangan relatif adalah perbandingan relativitas yang diberikan dua variabel bebas kepada variabel terikat tanpa mempertimbangkan variabel lain yang tidak diteliti. Sumbangan relatif dalam persen/SR% tiap prediktor adalah:

$$\text{Prediktor X} = \text{SR\%} = \frac{A}{\sum xy} \times 100\%$$

Keterangan:

SR% : sumbangan relatif dari suatu prediktor

A : koefisien prediktor

$\sum xy$  : jumlah produk antara x dan y

JKreg : jumlah kuadrat regresi (Sutrisno Hadi, 2004: 36)

#### **e. Sumbangan Efektif**

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan secara efektif setiap prediktor terhadap kriterium dengan tetap mempertimbangkan variabel bebas lain yang tidak diteliti.

Efektivitas regresi dicerminkan dalam koefisien determinasi  $(R)^2$  maka SE% tiap prediktor dapat dihitung langsung dari  $R^2$ .

$$SE\% = SR\% \times R^2$$

Keterangan:

SE% : sumbangan efektif dari suatu prediktor

SR% : sumbangan relatif dari suatu prediktor

$R^2$  : koefisien determinan (Sutrisno Hadi, 2004: 39)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kelembagaan**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua Eselon II dari Badan Pertanahan Nasional RI yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang membawahi seluruh eselon III di tingkat Kabupaten dan Kota yang dikepalai oleh Kepala Kantor Pertanahan serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dalam sejarah pada tahun 1946 BPN memakai nama "*Agrarische Zaken*". Setelah Indonesia lepas dari penjajah Belanda tahun 1954, Indonesia mengganti "*Agrarische Zaken*" menjadi Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan ini disusun oleh aparat yang menangani keagrariaan.

Setelah mengalami perkembangan, Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa belum sempurna sehingga pada tahun 1973 diubah menjadi Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana dari peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978, di tiap-tiap provinsi terbentuklah Direktorat Agraria Daerah dibawah Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya Direktorat Agraria provinsi DIY berganti nama lagi menjadi Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana dari Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988.



Pada Tahun 2006 dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan sejarahnya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang telah cukup lama hadir di Indonesia dan telah meluluskan dalam bilangan ribuan mahasiswa yang kini tersebar di seluruh tanah air. Keberadaan STPN yang memiliki sejarah panjang sebagai Perguruan Tinggi sejak tahun 1963 dengan nama Akademi Agraria, maka dapat digolongkan sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia. Bila melihat dari kekhususan substansi pendidikannya yaitu Pendidikan Tinggi Pertanahan maka STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pertanahan secara terpadu, menekuni kekhususan bidang tersebut dan berusaha mengembangkannya sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan mandiri. Lahirnya Akademi Agraria pada tahun 1963 yang merupakan cikal bakal STPN tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya UUPA tahun 1960 yang membawa perubahan besar dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Ada lima misi utama yang dibawa dengan lahirnya UUPA tersebut yaitu:

1. Perombakan Hukum Agraria
2. Pelaksanaan Landreform
3. Penataan Penggunaan Tanah

4. Likuidasi hak-hak asing dalam bidang Agraria

5. Penghapusan sisa-sisa feodal dalam bidang agraria

Untuk dapat melaksanakan tugas berat tersebut maka diperlukan lebih banyak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang mampu menangani dan mengelola tugas bidang pertanahan. Tenaga ahli dan profesional yang dimaksud disini adalah tenaga yang mempunyai kecakapan, kemahiran dan keterampilan untuk membina, mengembangkan dan atau melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, pengaturan pendaftaran hak untuk mencapai kepastian hak dan pengaturan administrasi pertanahan baik di pusat maupun daerah disamping memiliki integritas kepribadian yang tinggi.

Oleh karena itu, Akademi Agraria yang kemudian dirubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional terus ditingkatkan dan dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang menetapkan program pendidikannya secara konsisten berupa program pendidikan keahlian

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **i. Visi**

Sesuai dengan kebijakan pembangunan pertanahan tahun 2010 - 2014 ditetapkan visi pembangunan pertanahan 2010 - 2014 yang termuat dalam Renstra BPN-RI yaitu : “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia“.

Dengan memperhatikan visi Badan Pertanahan Nasional serta masalah-masalah yang dihadapi oleh Kanwil BPN Provinsi DIY maka ditetapkan visi Kanwil BPN Provinsi DIY Tahun 2010 – 2014 yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu :  
 “Menjadikan Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY sebagai sumber informasi pertanahan menuju ke sistem pertanahan yang terpadu, efektif dan efisien dalam upaya pendayagunaan tanah bagi kepentingan masyarakat dengan prioritas utama mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pengelolaan pertanahan di Provinsi DIY”

## **ii. Misi**

Berdasarkan misi BPN-RI tahun 2010 – 2014, ditetapkan misi pembangunan pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
- b) Percepatan penetapan hubungan hukum dan pelaksanaan pendaftaran tanah yang transparan dan efisien;

- c) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan pengaturan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai RTRW;
- d) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mencegah dan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di provinsi DIY;
- e) Melaksanakan sistem informasi manajemen pertanahan bagi pemerintah, masyarakat, pembangunan dan investasi.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan terlaksananya penegakkan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Prinsip dan azas pengelolaan pertanahan nasional dijalankan dengan 4 prinsip pertanahan yaitu:

- a) Pengelolaan pertanahan harus berkontribusi pada kesejahteraan rakyat (*welfare*);
- b) Pengelolaan pertanahan harus berkontribusi pada keadilan (*justice*);
- c) Pengelolaan pertanahan harus berkontribusi pada Indonesian Sustainability Society (*sustainability*);

- d) Pengelolaan pertanahan harus berkontribusi pada harmoni kemasyarakatan (*harmony*).

## **b. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

### **i. Visi**

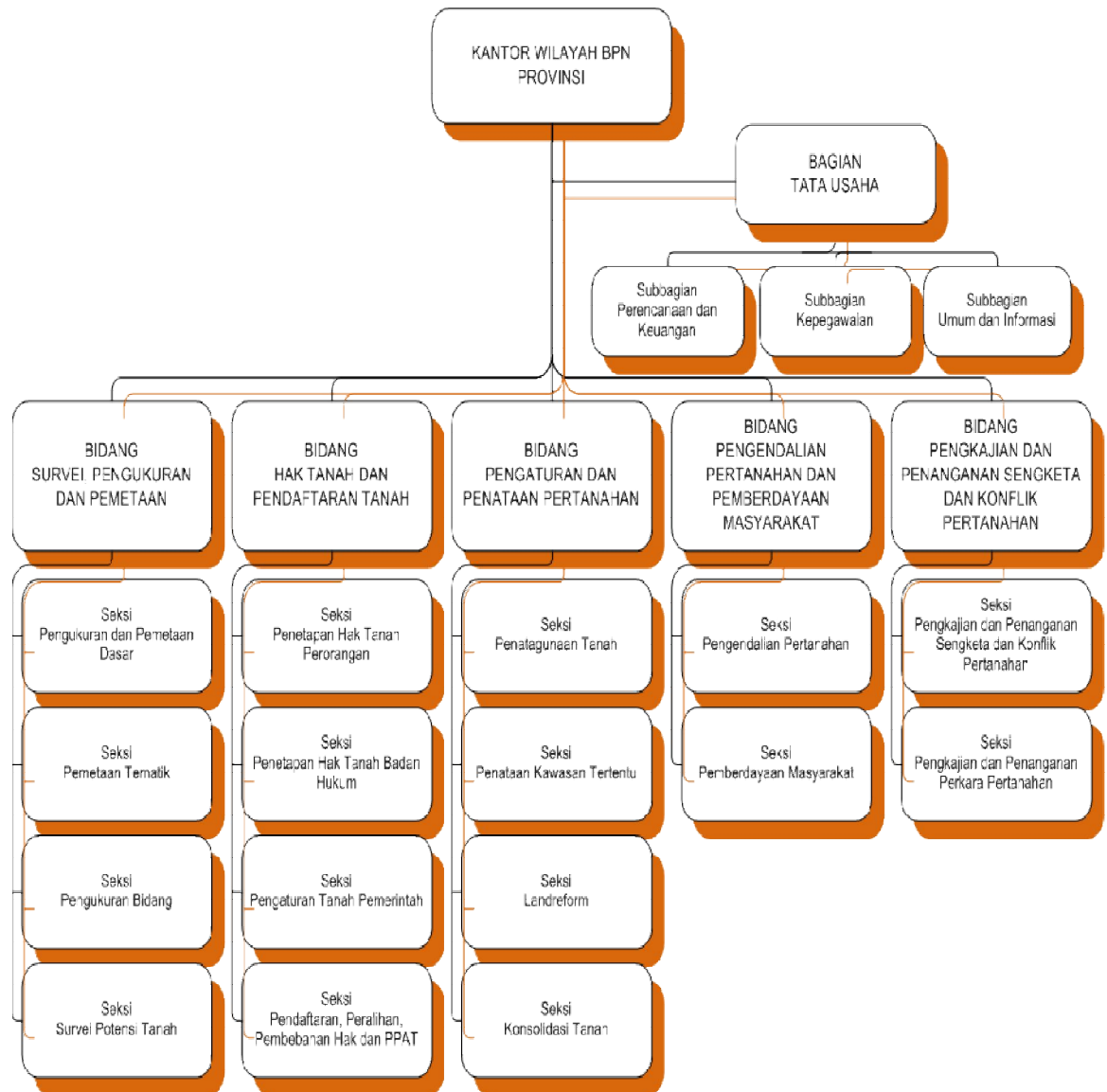
Terbentuknya manusia susila, cakap, dan profesional dibidang teknis dan administrasi pertanahan serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Tang Maha Esa, serta mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi terhadap pemerintah, bangsa, dan negara.

### **ii. Misi**

menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang mendukung pembangunan dalam bidang pertanahan, mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan, membina kehidupan akademik yang sehat, dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang tersedia.

### 3. Struktur Organisasi

#### a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

## b. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

Sumber : [www.stpn.ac.id](http://www.stpn.ac.id)

## B. Deskripsi Data Khusus

### 1. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 6. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
SMA/ Sederajat	4	11.4	11.4	11.4
D I	3	8.6	8.6	20.0
D III	7	20.0	20.0	40.0
D IV	14	40.0	40.0	80.0
S 1	7	20.0	20.0	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer 2014

Dapat dilihat bahwa pegawai instansi tersebut paling banyak adalah lulusan D IV, tidak ada karyawan yang lulusan SD dan SMP.

## 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Kerja

Deskripsi data responden berdasarkan lama kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid 1 - 3 tahun	7	20.0	20.0	20.0
4 - 7 tahun	28	80.0	80.0	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer 2014

Dalam tabel tersebut menunjukkan jumlah persentase lama bekerja untuk masing-masing pegawai yang bekerja di BPN RI di Provinsi D.I.Yogyakarta. Pegawai yang bekerja diantara 1 tahun sampai dengan 3 tahun terdapat 7 orang, sedangkan diantara 4 tahun sampai dengan 7 tahun terdapat 28 orang.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Kategori Variabel

Deskripsi kategori variabel merupakan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, yaitu etika, pengalaman, dan kompetensi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran setiap variabel yang ada di dalam penelitian.



Statistik deskriptif yang disajikan terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Statistik Deskriptif

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Etika	18,00	40,00	30,8857	5,55068
Kompetensi	23,00	37,00	32,1714	3,54372
Pengalaman	23,00	37,00	30,1714	4,34190
Kualitas	27,00	47,00	37,8857	4,76983

Sumber: Data Primer 2014

Deskripsi hasil penelitian untuk setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat di bawah ini:

#### a. Etika

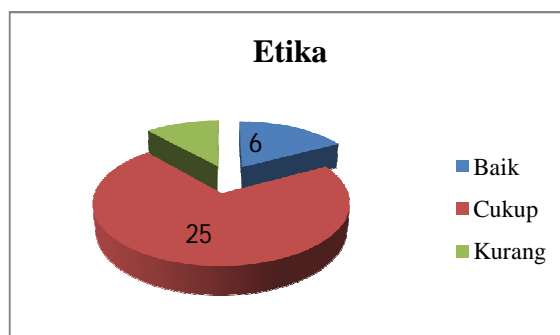
Hasil analisis deskriptif pada variabel etika diperoleh nilai minimum sebesar 18,00; nilai maksimum sebesar 40,00; mean sebesar 30,88; dan standar deviasi sebesar 5,55. Pengkategorian data etika dibuat berdasarkan mean dan standar deviasi. Kategorisasi etika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Kategorisasi Etika

<b>Kategori</b>	<b>Interval Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	$X \geq 36,43$	6	17,1
Cukup	$25,33 \leq X < 36,43$	25	71,4
Kurang	$X < 25,33$	4	11,4
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki etika dalam kategori cukup baik yaitu 25 orang (71,4%), kategori baik 6 orang (17,1%), dan sisanya 4 orang (11,4%) termasuk dalam kategori kurang. Hasil deskriptif tersebut dapat juga disajikan dalam bentuk diagram seperti berikut:



**Gambar 4. Diagram Kategori Etika**

#### **b. Kompetensi**

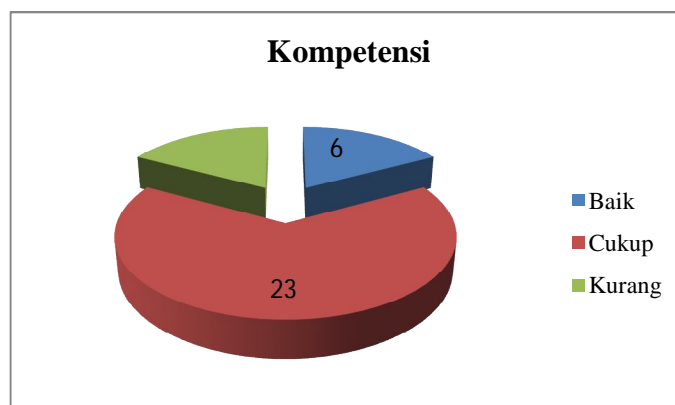
Hasil analisis deskriptif pada variabel kompetensi diperoleh nilai minimum sebesar 23,00; nilai maksimum sebesar 37,00; mean sebesar 32,17; dan standar deviasi sebesar 3,54. Pengkategorian data kompetensi dibuat berdasarkan mean dan standar deviasi. Kategorisasi kompetensi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 10. Kategorisasi Kompetensi**

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X \geq 35,7$	6	17,1
Cukup	$28,6 \leq X < 35,7$	23	65,7
Kurang	$X < 28,6$	6	17,1
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kompetensi termasuk dalam kategori cukup baik yaitu 23 orang (65,7%), kategori baik dan kurang masing-masing 6 orang (17,1%) . Hasil deskriptif tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk diagram seperti berikut:



**Gambar 5. Diagram Kategori Kompetensi**

### c. Pengalaman

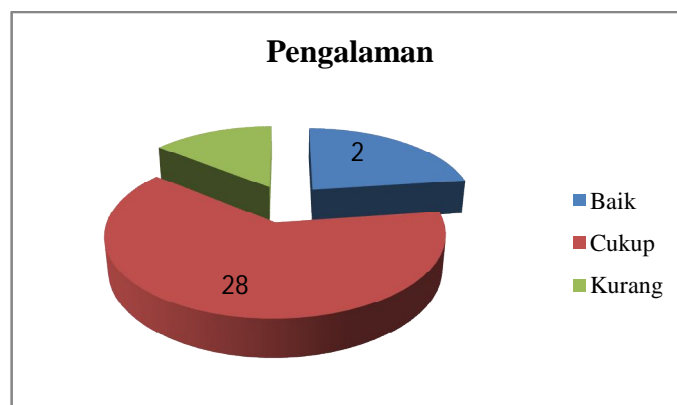
Hasil analisis deskriptif pada variabel pengalaman diperoleh nilai minimum sebesar 23,00; nilai maksimum sebesar 37,00; mean sebesar 30,17; dan standar deviasi sebesar 4,34. Pengkategorian data pengalaman dibuat berdasarkan mean dan standar deviasi. Kategorisasi pengalaman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Kategorisasi Pengalaman

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X \geq 34,5$	2	5,7
Cukup	$25,8 \leq X < 34,5$	28	80,0
Kurang	$X < 25,8$	5	14,3
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi terhadap pengalaman termasuk dalam kategori cukup baik yaitu 28 orang (80,0%). Hasil deskriptif tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk tabel seperti berikut:



**Gambar 6. Diagram Kategori Pengalaman**

**d. Kualitas laporan keuangan**

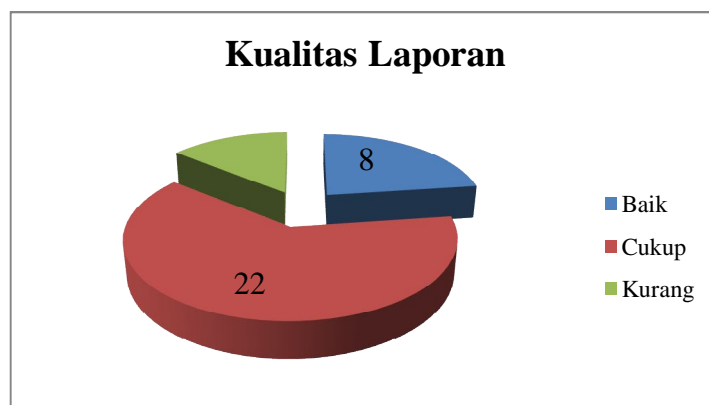
Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh nilai minimum variabel kualitas laporan keuangan sebesar 27,00; nilai maksimum sebesar 47,00; mean sebesar 37,89; dan standar deviasi sebesar 4,77. Pengkategorian data kualitas laporan keuangan dibuat berdasarkan mean dan standar deviasi. Kategorisasi kualitas laporan keuangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 12. Kategorisasi Kualitas laporan keuangan**

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X \geq 42,6$	8	22,9
Cukup	$33,1 \leq X < 42,6$	22	62,9
Kurang	$X < 33,1$	5	14,3
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan persepsi terhadap kualitas laporan keuangan termasuk dalam kategori cukup baik yaitu 22 orang (62,9%) Hasil deskriptif tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk diagram seperti berikut:



**Gambar. 7 Diagram Kategori Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat**

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah bebas dari masalah normalitas, linieritas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Jika salah satu asumsi klasik tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan bias pada persamaan regresi yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pengujian asumsi klasik merupakan syarat utama yang harus terpenuhi sebelum dilakukan analisis data dengan uji regresi.

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas menggunakan rumus *Chi Kuadrat* dengan taraf signifikansi 5%. Untuk mengetahuinya digunakan uji *Chi Kuadrat* dengan melihat tingkat signifikansinya. Distribusi data penelitian dinyatakan normal

jika memiliki nilai probabilitas ( $\text{sig} > 0,05$ ). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas yang dilakukan:

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>chi kuadrat</i>	Signifikansi	Keterangan
Etika	7,686	0,973	Normal
Kompetensi	12,171	0,432	Normal
Pengalaman	6,971	0,859	Normal
Kualitas Laporan	12,571	0,561	Normal

Sumber: Data Primer 2014

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal.

#### b. Uji Linieritas

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Kriteria pengujian linieritas adalah jika nilai signifikansi pada masing-masing variabel dependen lebih besar dari pada nilai taraf signifikasi 0,05, maka hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini:

Tabel 14. Hasil Uji Linieritas

Variabel	F hitung	Signifikansi	Keterangan
Etika	0,716	0,745	Linier
Kompetensi	1,486	0,206	Linier
Pengalaman	0,896	0,558	Linier

Sumber: Data Primer 2014

Hasil uji linieritas pada tabel 14 dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih

besar dari 0,05 dan F hitung lebih kecil dari F tabel (4,11) hal ini menunjukkan variabel penelitian linier.

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai terdapat korelasi antar variabel independen (bebas)-nya. Model yang baik model yang variabel yang dipakai tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahuinya dapat dilihat nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 5. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Variabel dependen: Kualitas</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Toleransi</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Etika	0,833	1,200	Non Multikolinearitas
Kompetensi	0,901	1,110	Non Multikolinearitas
Pengalaman	0,916	1,092	Non Multikolinearitas

Sumber: Data Primer 2014

Penyimpangan asumsi klasik ini karena adanya Multikolinieritas dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Cara untuk menguji tidak adanya Multikolinieritas dapat dilihat pada *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel kurang dari 5 dan nilai toleransinya di atas 0,1. Dengan demikian pada model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas.

#### d. Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah setiap nilai X berpasangan dengan Y mempunyai distribusi dan varians yang sama atau tidak. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji korelasi jenjang *Spearman*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Etika	0,593	Non heteroskedastisitas
Kompetensi	0,994	Non heteroskedastisitas
Pengalaman	0,979	Non heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer 2014

Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi tiap variabel lebih besar dari nilai alpha yang telah ditetapkan sebelumnya (0,05). Dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa dari data yang diperoleh tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Sehingga data dapat digunakan untuk melanjutkan analisis berganda berganda.

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 19.00 for windows*. Analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F (*Fisher*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua faktor yang meliputi: etika, kompetensi, dan pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Apabila nilai signifikansi



lebih kecil dari 0,05 ( $sig < 0,05$ ) maka model regresi signifikan secara statistik. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows versi 19.00*. Hasil rangkuman analisis regresi berganda disajikan berikut ini.

Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized coefficient B</i>	t hitung	Sig.	Kesimpulan
Etika	0,349	3,528	0,001	Signifikan
Kompetensi	0,676	4,536	0,000	Signifikan
Pengalaman	0,276	2,287	0,029	Signifikan
Konstanta = -2,983				
$R^2_{square} = 0,657$				
F hitung = 19,816				
Sig. = 0,000				

Sumber: Data Primer 2014

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,983 + 0,349X_1 + 0,676X_2 + 0,276X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -2,983 dapat diartikan variabel kualitas laporan akan mengalami penurunan sebesar 2,983 tanpa adanya pengaruh dari variabel etika, kompetensi, dan pengalaman.
2. Nilai koefisien pada variabel etika sebesar 0,349 artinya setiap perubahan variabel etika sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 0,349 satuan, dengan asumsi yang lain adalah tetap. Nilai t hitung variabel etika sebesar 3,528 dengan nilai signifikansi 0,001 yang signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam mengelola barang

milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

3. Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 4,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,676 yang berarti setiap kenaikan variabel kompetensi sebesar satu satuan maka variabel kualitas akan naik sebesar 0,676 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Variabel kompetensi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Nilai  $t$  hitung variabel pengalaman sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi 0,029 yang signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Nilai koefisien pada variabel pengalaman sebesar 0,276 artinya setiap perubahan variabel pengalaman sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 0,276 satuan, dengan asumsi yang lain adalah tetap.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $F$  hitung sebesar 19,816 dan  $F$  tabel sebesar 2,88 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $19,816 > 2,88$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $sig < 0,05$ ), maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh antara

etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.”  
**diterima.**

Hasil uji  $R^2$  pada penelitian ini diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,657. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dipengaruhi oleh variabel etika dan kompetensi sebesar 65,7%, sedangkan sisanya sebesar 34,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Sumbangan efektif dan relatif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat menjelaskan variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Hasil sumbangan efektif dan relatif dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 18. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

No	Nama Variabel Bebas	Sumbangan	
		Efektif	Relatif
1	Etika	25,4%	38,7%
2	Kompetensi	31,2%	47,6%
3	Pengalaman	9,0%	13,7%
<b>Total</b>		65,7%	100,0%

\*) Variabel terikat: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah 2014

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam Tabel 18 diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel etika memberikan sumbangan efektif (SE%) sebesar 25,4%, variabel kompetensi sebesar 31,21%, dan variabel pengalaman sebesar 9,0%. Secara bersama-sama variabel etika, pengalaman, dan kompetensi memberikan sumbangan efektif sebesar 65,7% terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **D. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh antara etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut, dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,657. Hal ini berarti etika, pengalaman, dan kompetensi dalam mengelola barang milik negara memberikan kontribusi sebesar 65,7% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, sedangkan 34,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

##### **1. Etika dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai t hitung variabel etika sebesar 3,528 dengan nilai signifikansi 0,001 yang signifikan pada tingkat 5%. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,349 yang artinya semakin baik etika maka kualitas laporan keuangan semakin baik juga.

Etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu, misalnya Aparatur Pemerintahan. Aturan etika menjelaskan kapan suatu perilaku dapat diterima dan kapan suatu perilaku tidak dapat diterima atau dianggap salah. Etika sangat erat kaitannya dengan

hubungan yang mendasar antar manusia, dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang bermoral.

Pada etika, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep diri dari sistem nilai yang ada pada pengelola aset sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai di luar dirinya. Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku etikanya, sesuai dengan peran yang disandangnya. Menurut Cohen et al.(1980:171), setiap tindakan individu pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, setelah berinteraksi dengan pengalaman- pengalaman pribadi dan sistem nilai individu, akan menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam setiap perilakunya, sebelum akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Masalah etika merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam profesi akuntansi karena akuntansi memiliki dua tuan yang harus dilayaninya, yaitu klien dan masyarakat/publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar/*fair* (Shaub: 1993:146). Pendapat ini didukung oleh Wahyudi Prakarsa yang menyatakan bahwa seorang auditor memikul tanggung jawab ganda, pertama kepada para nasabah/klien yang membayar *fee* untuk pekerjaan profesional yang dilakukan, dan kedua kepada publik untuk melaporkan *fairness* dari laporan keuangan.

Beberapa peneliti menemukan bahwa perilaku etis dipengaruhi secara signifikan oleh pihak lain yang dihadapi dalam lingkungan

profesinya tanpa memperhatikan apakah perilakunya sesuai dengan kode etik atau tidak. Tingkat pengaruh itu mungkin dipengaruhi oleh kedekatan hubungan antara organisasi dengan pihak lain yang berkaitan, dengan pihak yang berkuasa baik dari dalam organisasi, seperti pimpinan organisasi maupun di luar organisasi, seperti pemerintah, Kantor Akuntan lain, dan sebagainya (Finn et al. 1988:25). Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Shaub dan Finn (1993:146) menunjukkan bahwa orientasi etika (yang dibentuk oleh lingkungan budaya dan pengalaman pribadi) tidak hanya berpengaruh terhadap sensitivitas etika pengelola aset namun juga berpengaruh terhadap tingkat komitmen organisasi maupun komitmen profesinya.

## **2. Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.**

Nilai  $t$  hitung pada variabel kompetensi sebesar 4,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Nilai koefisien regresi sebesar 0,676 yang berarti setiap kenaikan variabel kompetensi sebesar satu satuan maka variabel kualitas akan naik sebesar 0,676 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

Yang dimaksud dengan variabel kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang pegawai sebagai hasil dari pendidikan formal, keikutsertaan dalam pelatihan, seminar simposium dan

lain-lain. Kompetensi para pengelola aset diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan diharapkan pengelola Aset BMN yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melakukan tugasnya.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, pengelola BMN harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Dalam penelitian juga disimpulkan bahwa program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian dalam pembuatan Laporan Keuangan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi akan mempengaruhi kemampuan para pembuat pelaporan keuangan untuk mengetahui kekeliruan yang ada di satuan kerja yang menjadi kliennya. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pembuat laporan BMN akan meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola aset. Kecakapan dalam membuat laporan keuangan dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pembuat laporan keuangan pemerintah pusat menjadi berkualitas.

### **3. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.**

Hasil penelitian ini mampu membuktikan bahwa pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung variabel pengalaman sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi 0,029 yang signifikan pada tingkat 5% Nilai koefisien pada variabel pengalaman sebesar 0,276 artinya setiap perubahan variabel pengalaman sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 0,276 satuan.

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Sehubungan dengan pengalaman seorang auditor, pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. (Ida, 2003). Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kematangan seseorang, dalam arti ia dapat memperoleh pelajaran dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hal ini akan mendorongnya bekerja secara lebih efektif dan



efisien. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman, diskusi mengenai pengelolaan BMN dengan rekan sekerja, pengawasan dan *review* oleh inspektorat, mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan BMN.

**4. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.**

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 19,816 dan F tabel sebesar 2,88 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Laporan Keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Beberapa informasi penting yang berkualitas terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). informasi penting yang berkualitas ditampung dalam laporan keuangan untuk kemudahannya segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan

yang memadai tentang aktivitas ekonomi, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Etika, Kompetensi, dan Pengalaman, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Adanya keterbatasan pada teknik pengambilan data yang berupa kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif etika dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 3,528 dengan nilai signifikansi 0,001, kurang dari 0,05 ( $P < 0,05$ ) serta koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,349. Semakin baik etika yang dimiliki pegawai, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.
2. Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 4,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,676 yang berarti setiap kenaikan kompetensi sebesar satu satuan maka variabel kualitas akan naik sebesar 0,676 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.
3. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung variabel pengalaman sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi 0,029 yang signifikan pada tingkat 5%. Nilai koefisien pada variabel

pengalaman sebesar 0,276 artinya setiap perubahan variabel pengalaman sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 0,276 satuan.

4. Terdapat pengaruh etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 19,816 lebih besar F tabel sebesar 2,28 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

### **1. Bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta**

Lembaga pemerintah terkait disarankan mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Mengingat variabel independen dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 65,7%, sisanya 34,3% dipengaruhi faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000, *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki., 2000. *Intermedite Accounting*, BPFE, Yogyakarta.
- BPKP, 1996. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA APFP).
- BPN RI, *Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Tidak Diterbitkan, 2011
- Boulter.N, Dalziel dan Hill. J. (1996), *People and Competencies*, Bidlles, Ltd. London.
- Cohen. J. R., L. W. Part and D.J Sharp. 1996. "Measuring The Ethical Awarness and ethical Orientation of Canadian Auditor". *Research in Accounting* Vol 7 pp 37-64
- Ebert, Ronald J and Ricky W. Griffin, 2006, "Bisnis", Alih Bahasa Rd. Soemarnagara, Jakarta : Erlangga
- Finn, D.W., L.B Chonko, and J.D Hunt, 1988. "Ethical Problem in Public Accounting: The View From The Top". *Journal of Bussiness Ethics*, 7, pp 605-615
- Gede Artjana, I. (2004). *Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan dan Harapan*.  
<http://ina.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Upaya%20Membangun%20Akuntabilitas%20Pengelolaan%20dan%20Pertanggungjawaban%20Keuangan%20Negara%20di%20Lingkungan%20Militer%20-%20I%20Gde%20Atjana.pdf>. Diunduh 31 Mei 2014
- Ghozali, Imam, 2009. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS" edisi 3
- Government Accounting Standard Board (GASB). 2009. *Statement No. 54 Fund balance Reporting and Govermental Fund Type Definitions*.  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2303698](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2303698). Di unduh 10 April 2014
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta : Andi.

- Indra Bastian. 2006 Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta, bab 1 & 2
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- J.Supranto, 2003, Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Lima. Jakarta: Erlangga
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, 2012
- Kementerian Keuangan RI, *Deraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*
- Margono, 2012, *Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Masmudi, 2003, Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Volume 3 nomor 1
- Mulyana, Iman. 2010. Manajemen dan Kehidupan Manusia  
[http://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=kualitas+adalah&hl=id&ei=jSVGTujhNYXVrQeM9KTTAw&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=kualitas&f=false](http://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=kualitas+adalah&hl=id&ei=jSVGTujhNYXVrQeM9KTTAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=kualitas&f=false)
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Pemerintah Republik Indoneia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional*.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Peggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009. *Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah*
- Ranupandojo, Heidjrahman, 2004, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPFE
- Robbins, S.P., 2003, *Perilaku Organisasi*, Jilid I, Edisi 9 (Indonesia), PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Singarimbun, 1995, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2008 : *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto.(2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukamto, 1991 : Pengajaran Etika Profesional, Makalah Seminar Pengajaran Audit Akuntansi, PAU UGM

Sulistyo Joko, 2010, *6 Hari jago SPSS 17*, Jakarta : Erlangga

Suraida, Ida.2003.Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, Resiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan GoverPublik. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

Shaub, Michael K., and Don W.Finn. 1993. "The Effect of Auditor's Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensitivity". *Behavioral Research in Accounting* Vol.5 pp 146-166

Tjandra, Riawan, 2009. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana,.

Website BPN RI : [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

Website STPN RI : [www.stpn.ac.id](http://www.stpn.ac.id)



**LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kuisioner Uji Coba Instrumen Penelitian

**KUISONER PENELITIAN**

Tempat, Tanggal (Diisi oleh peneliti):.....

Kepada

Yth. Bapak/Ibu  
Pengelola Asset BMN Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta  
dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya :

Nama : Aditya Bachtiar Rifa'i

Nim : 09412147013

Jurusan : Akuntansi

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap. Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Aditya Bachtiar Rifa'i

**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : ..... (Boleh Tidak di isi)
2. Pendidikan terakhir :
  1. SMA/ Sederajat
  2. Diploma
  3. Strata 1 (Sarjana)
  4. Lainnya.....
3. Jurusan :
  1. Akuntansi
  2. Manajemen
  3. Hukum
  4. Lainnya.....
4. Berapa lamakah Anda telah menjadi Pengelola BMN ditempat Anda bekerja sekarang:
  1. 1 – 3 Tahun
  2. 4 – 7 Tahun
  3. 8 – 11 Tahun
  4. 11- 15 Tahun
  5. > 15 Tahun

### 1. Varibel Etika (X<sub>1</sub>)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengelola Asset BMN melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan pengabdian dan penuh tanggung jawab					
2.	Pengelola Asset BMN selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika					
3.	Pengelola Asset BMN harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas					
4.	Saya harus selalu mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi etika serta hukum yang ada di Indonesia					
5.	Saya harus selalu mempertahankan tingkat integritas dan objectivitas yang tinggi alam melakukan pekerjaan.					
6.	Seorang pengelola Asset BMN tidak harus mengingat semua bab dan pasal yang terdapat dalam kode etik namun harus mengamalkannya					
7.	Saya harus meningkatkan kecakapan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat					

8.	Saya wajib menjunjung tinggi tanggung jawab moral, sosial dan profesional					
9.	Saya boleh menggunakan pengetahuan atau informasi yang saya peroleh dari pelaksanaan tugas untuk kepentingan sendiri atau pihak ketiga					
10.	Setiap bekerja dengan orang yang lebih tua walaupun pangkatnya lebih rendah dari saya, tetap saya hormati dan berperilaku sopan santun terhadap beliau					

## 2. Variabel Kompetensi (X<sub>2</sub>)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Selalu bekerja dengan arah yang pasti, ketikadalam menyelesaikan suatu masalah telah adaperaturan yang harus diikuti.					
2.	Dalam menyesuaikan suatu masalah denganmasalah yang berbeda, dibutuhkan waktu yang relatif lama.					
3.	Orang-orang yang mendahulukan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusannya (tugas dan tanggung jawabnya) baru kemudian bersenang-senang setelah tugasnya selesai akan disenangi orang lain.					

<b>4.</b>	Bekerja dengan orang lain dalam satu tim adalah lebih baik daripada bekerja secara sendirian					
<b>5.</b>	Pengelola Asset BMN mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan,					
<b>6.</b>	Pengelola Asset BMN mampu mengembangkan solusi alternatif dan rekomendasi serta memilih tindakan yang tepat dalam menunjang proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya					
<b>7.</b>	Pengelola Asset BMN telah memahami segala konsekuensi keputusan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.					
<b>8.</b>	Pengelola Asset BMN mampu menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten.					
<b>9.</b>	Pengelola Asset BMN hadir dan pulang secara rutin dan tepat waktu.					
<b>10.</b>	Pengelola Asset BMN senantiasa mengikuti dan melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan					

### 3. Varibel Pengalaman (X<sub>3</sub>)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Semakin lama menjadi Pengelola Asset BMN, semakin mengerti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.					
2.	Semakin lama bekerja sebagai Pengelola Asset BMN semakin dapat mengetahui informasi yang relevan untuk membuat laporan BMN setiap semester/tahunan.					
3.	Semakin kompleks tugas yang saya kerjakan, pengalaman saya semakin berkembang					
4.	Banyaknya tugas yang dihadapi selama masa kerja memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang pernah dialami.					
5.	Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu Pengelola Asset BMN untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas					
6.	Semakin sering menyelesaikan tugas dalam Pengelolaan Asset BMN setiap tahunnya, semakin mengerti kondisi Asset BMN yang terdapat di kantor					

7.	Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang di emban sebagai pengelola Asset BMN, maka semakin kompeten dalam menyelesaikan semua tugasnya					
8.	Saya membuat laporan pengelolaan Asset BMN lebih dari 2 tahun sehingga laporan yang saya buat lebih baik					
9.	Saya terbiasa membuat laporan BMN setiap tahun/semester, jadi saya akan membuat laporan BMN yang akan datang mendekati waktu deadline					
10.	Semakin saya sering bertemu dengan rekan sesama pengelola Asset BMN, semakin bertambah wawasan mengenai pengelolaan BMN					

#### 4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya.					
2.	Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan.					
3.	Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu					



	relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.					
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.					
5.	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.					
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami.					
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh					
8.	Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLK) dapat dipahami dengan mudah.					
9.	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kondisi keuangan kantor.					
10.	Informasi laporan keuangan yang akuntabel penting untuk mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK					

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

Lampiran 2 : Kuisoner Instrumen Penelitian

**KUISONER PENELITIAN**

Tempat, Tanggal (Diisi oleh peneliti):.....

Kepada

Yth. Bapak/Ibu  
Pengelola Asset BMN Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta  
dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya :

Nama : Aditya Bachtiar Rifa'i

Nim : 09412147013

Jurusan : Akuntansi

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap. Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Aditya Bachtiar Rifa'i

**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : ..... (Boleh Tidak di isi)
2. Pendidikan terakhir :
  1. SMA/ Sederajat
  2. Diploma
  3. Strata 1 (Sarjana)
  4. Lainnya.....
3. Jurusan :
  1. Akuntansi
  2. Manajemen
  3. Hukum
  4. Lainnya.....
4. Berapa lamakah Anda telah menjadi Pengelola BMN ditempat Anda bekerja sekarang:
  1. 1 – 3 Tahun
  2. 4 – 7 Tahun
  3. 8 – 11 Tahun
  4. 11- 15 Tahun
  5. > 15 Tahun

### 1. Varibel Etika (X<sub>1</sub>)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengelola Asset BMN melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan pengabdian dan penuh tanggung jawab					
2.	Pengelola Asset BMN selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika					
3.	Pengelola Asset BMN harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas					
4.	Saya harus selalu mempertahankan nama baik profesi dengan menjunjung tinggi etika serta hukum yang ada di Indonesia					
5.	Saya harus selalu mempertahankan tingkat integritas dan objectivitas yang tinggi alam melakukan pekerjaan.					
6.	Saya harus meningkatkan kecakapan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat					
7.	Saya wajib menjunjung tinggi tanggung jawab moral, sosial dan profesional					
8.	Setiap bekerja dengan orang yang lebih					

	tua walaupun pangkatnya lebih rendah dari saya, tetap saya hormati dan berperilaku sopan santun terhadap beliau					
--	---	--	--	--	--	--

## 2. Variabel Kompetensi (X<sub>2</sub>)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Selalu bekerja dengan arah yang pasti, ketikadalam menyelesaikan suatu masalah telah ada peraturan yang harus diikuti.					
2.	Orang-orang yang mendahulukan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusannya (tugas dan tanggung jawabnya) baru kemudian bersenang-senang setelah tugasnyaselesai akan disenangi orang lain.					
3.	Bekerja dengan orang lain dalam satu tim adalah lebih baik daripada bekerja secara sendirian					
4.	Pengelola Asset BMN mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan,					
5.	Pengelola Asset BMN mampu mengembangkan solusi alternatif dan rekomendasi serta memilih tindakan yang tepat dalam menunjang proses					

	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya					
6.	Pengelola Asset BMN telah memahami segala konsekuensi keputusan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.					
7.	Pengelola Asset BMN mampu menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten.					
8.	Pengelola Asset BMN hadir dan pulang secara rutin dan tepat waktu.					
9.	Pengelola Asset BMN senantiasa mengikuti dan melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan					

### 3. Varibel Pengalaman (X3)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Semakin lama menjadi Pengelola Asset BMN, semakin mengerti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.					
2.	Semakin lama bekerja sebagai Pengelola Asset BMN semakin dapat mengetahui informasi yang relevan untuk membuat laporan BMN setiap semester/tahunan.					

<b>3.</b>	Semakin kompleks tugas yang saya kerjakan, pengalaman saya semakin berkembang					
<b>4.</b>	Banyaknya tugas yang dihadapi selama masa kerja memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang pernah dialami.					
<b>5.</b>	Semakin sering menyelesaikan tugas dalam Pengelolaan Asset BMN setiap tahunnya, semakin mengerti kondisi Asset BMN yang terdapat di kantor					
<b>6.</b>	Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang di emban sebagai pengelola Asset BMN, maka semakin kompeten dalam menyelesaikan semua tugasnya					
<b>7.</b>	Saya membuat laporan pengelolaan Aset BMN lebih dari 2 tahun sehingga laporan yang saya buat leih baik					
<b>8.</b>	Semakin saya sering bertemu dengan rekan sesama pengelola aset BMN, semakin bertambah wawasan mengenai pengelolaan BMN					

#### 4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana:

**STS= Sangat Tidak Setuju , TS= Tidak Setuju , N= Netral, S= Setuju, SS= Sangat Setuju**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya.					
2.	Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan.					
3.	Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.					
4.	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.					
5.	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.					
6.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami.					
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila					



	pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh					
<b>8.</b>	Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Neraca, LRA, dan CaLK) dapat dipahami dengan mudah.					
<b>9.</b>	Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kondisi keuangan kantor.					
<b>10.</b>	Informasi laporan keuangan yang akuntabel penting untuk mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK					

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

## Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kualitas Laporan

**Kualitas****Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	35	100,0
Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	35	100,0

a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,897	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
kua1	32,2286	43,240	,697	,883
kua2	32,2571	43,961	,685	,885
kua3	32,1429	40,538	,726	,881
kua4	32,5143	42,257	,710	,882
kua5	32,4571	47,020	,374	,903
kua6	32,3714	40,887	,801	,876
kua7	32,6286	44,946	,566	,891
kua8	32,3143	41,575	,701	,883
kua9	32,1714	44,793	,506	,896
kua10	32,4000	41,600	,673	,885

# Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Etika

## Etika

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,812	10

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
etika1	34,1714	24,499	,734	,764
etika2	34,2286	26,358	,605	,782
etika3	34,2571	27,138	,582	,785
etika4	34,2571	27,785	,533	,791
etika5	34,6571	25,820	,630	,778
etika6	34,3429	32,644	,051	,831
etika7	34,3714	28,358	,416	,803
etika8	34,4571	27,961	,534	,791
etika9	34,7143	31,798	,080	,837
etika10	34,0857	25,139	,704	,769

## Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kompetensi

### Kompetensi

**Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	35	100,0
Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	35	100,0

a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,821	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
komp1	31,0286	24,205	,472	,832
komp2	30,9429	26,055	,140	,838
komp3	31,0857	22,139	,657	,789
komp4	31,0857	21,551	,562	,798
komp5	31,0571	24,291	,379	,817
komp6	30,7714	22,946	,806	,786
komp7	31,0000	22,000	,753	,782
komp8	31,0000	22,176	,642	,791
komp9	31,1714	21,852	,537	,801
komp10	30,9714	22,323	,507	,805

## Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Pengalaman

### Pengalaman

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,776	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
peng1	33,1714	29,146	,390	,764
peng2	33,2857	26,034	,682	,722
peng3	33,2857	26,622	,584	,736
peng4	33,4571	29,255	,499	,751
peng5	33,1429	33,832	,019	,802
peng6	33,2571	28,961	,468	,754
peng7	33,1143	26,810	,606	,734
peng8	33,2571	25,726	,741	,715
peng9	32,7714	33,770	,022	,802
peng10	33,2286	28,829	,398	,763

## Lampiran 7 : Hasil Uji Karakteristik Responden

**Karakteristik Responden****Frequencies****Statistics**

		Pendidikan Terakhir	Lama Menjabat
N	Valid	35	35
	Missing	0	0

**Frequency Table****Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/ Sederajat	4	11.4	11.4	11.4
	D I	3	8.6	8.6	20.0
	D III	7	20.0	20.0	40.0
	D IV	14	40.0	40.0	80.0
	S 1	7	20.0	20.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**Lama Menjabat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 3 tahun	7	20.0	20.0	20.0
	4 - 7 tahun	28	80.0	80.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

## Lampiran 8 : Hasil Uji Kategorisasi Variabel X dan Y

### Kategorisasi

#### Rumus Kategori

#### Etika

$$\text{Mean} = 30.8857$$

$$\text{St Deviasi} = 5.55$$

$$\text{Baik} : X \geq M + SD$$

$$\text{Cukup} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Kurang} : X < M - SD$$

Kategori	Skor			
Baik	:	X	$\geq$	36.44
Cukup	:	25.34	$\leq$	X < 36.44
Kurang	:	X	<	25.34

#### Kompetensi

$$\text{Mean} = 32.1714$$

$$\text{St Deviasi} = 3.54$$

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Kategori	Skor			
Tinggi	:	X	$\geq$	35.7
Sedang	:	28.6	$\leq$	X < 35.7
Rendah	:	X	<	28.6

## Pengalaman

$$\begin{aligned} \text{Mi} &= 30.1714 \\ \text{Sdi} &= 4.34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tinggi} &: X \geq M + SD \\ \text{Sedang} &: M - SD \leq X < M + SD \\ \text{Rendah} &: X < M - SD \end{aligned}$$

Kategori	Skor			
Tinggi	:	X	$\geq$	34.5
Sedang	:	25.8	$\leq$	X < 34.5
Rendah	:	X	<	25.8

## Kualitas

$$\begin{aligned} \text{Mi} &= 37.8857 \\ \text{Sdi} &= 4.77 \\ \text{Tinggi} &: X \geq M + SD \\ \text{Sedang} &: M - SD \leq X < M + SD \\ \text{Rendah} &: X < M - SD \end{aligned}$$

Kategori	Skor			
Tinggi	:	X	$\geq$	42.7
Sedang	:	33.1	$\leq$	X < 42.7
Rendah	:	X	<	33.1



## Lampiran 9 : Data Hasil Uji Kategorisasi

**Data Kategori**

No	Etika		Kompetensi		Pengalaman		Kualitas	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	34	Cukup	35	Cukup	36	Cukup	44	Baik
2	33	Cukup	36	Baik	37	Baik	44	Baik
3	36	Cukup	33	Cukup	34	Cukup	44	Baik
4	40	Baik	36	Baik	37	Baik	45	Baik
5	26	Cukup	23	Kurang	35	Cukup	33	Kurang
6	18	Kurang	28	Kurang	23	Kurang	27	Kurang
7	32	Cukup	34	Cukup	25	Kurang	42	Cukup
8	30	Cukup	37	Baik	35	Cukup	43	Baik
9	32	Cukup	37	Baik	23	Kurang	41	Cukup
10	32	Cukup	34	Cukup	25	Kurang	41	Cukup
11	29	Cukup	31	Cukup	36	Cukup	34	Cukup
12	34	Cukup	29	Cukup	27	Cukup	37	Cukup
13	39	Baik	26	Kurang	31	Cukup	37	Cukup
14	37	Baik	36	Baik	35	Cukup	45	Baik
15	27	Cukup	31	Cukup	29	Cukup	39	Cukup
16	35	Cukup	36	Baik	26	Cukup	38	Cukup
17	31	Cukup	35	Cukup	27	Cukup	35	Cukup
18	32	Cukup	35	Cukup	30	Cukup	38	Cukup
19	38	Baik	32	Cukup	27	Cukup	41	Cukup
20	28	Cukup	34	Cukup	33	Cukup	34	Cukup

No	Etika		Kompetensi		Pengalaman		Kualitas	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
21	26	Cukup	34	Cukup	31	Cukup	35	Cukup
22	29	Cukup	35	Cukup	32	Cukup	35	Cukup
23	21	Kurang	30	Cukup	27	Cukup	34	Cukup
24	28	Cukup	27	Kurang	32	Cukup	33	Kurang
25	27	Cukup	31	Cukup	26	Cukup	32	Kurang
26	36	Cukup	26	Kurang	34	Cukup	34	Cukup
27	31	Cukup	32	Cukup	26	Cukup	37	Cukup
28	29	Cukup	32	Cukup	33	Cukup	43	Baik
29	20	Kurang	30	Cukup	27	Cukup	31	Kurang
30	38	Baik	34	Cukup	36	Cukup	47	Baik
31	28	Cukup	34	Cukup	26	Cukup	38	Cukup
32	31	Cukup	35	Cukup	25	Kurang	41	Cukup
33	38	Baik	30	Cukup	30	Cukup	34	Cukup
34	21	Kurang	27	Kurang	33	Cukup	35	Cukup
35	35	Cukup	31	Cukup	27	Cukup	35	Cukup

Lampiran 10 :Tabel Frekuensi Data

**Frekuensi Kategori****Frequencies****Statistics**

		Etika	Kompetensi	Pengalaman	Kualitas Laporan
N	Valid	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0

**Frequency Table****Etika**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	6	17,1	17,1	17,1
	Cukup	25	71,4	71,4	88,6
	Kurang	4	11,4	11,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Kompetensi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	6	17,1	17,1	17,1
	Cukup	23	65,7	65,7	82,9
	Kurang	6	17,1	17,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pengalaman**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	2	5,7	5,7	5,7
	Cukup	28	80,0	80,0	85,7
	Kurang	5	14,3	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Kualitas Laporan Keuangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	8	22,9	22,9	22,9
	Cukup	22	62,9	62,9	85,7
	Kurang	5	14,3	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

### Interval

#### Etika

Minimum 18.0  
 Maximum 40.0  
 Rentang 22.0  
 N 35  
 Panj Kelas  $1 + 3.3 \log n$   
 6.09542  
 5  
 $\approx$  6  
 Panj Interval 3.6667  
 $\approx$  3.6

No.	Interval			Frekuensi	Persen(%)
1	18.0	-	21.6	4	11.4%
2	21.7	-	25.3	0	0.0%
3	25.4	-	29.0	10	28.6%
4	29.1	-	32.7	8	22.9%
5	32.8	-	36.4	7	20.0%
6	36.5	-	40.1	6	17.1%
Jumlah				35	100.0%

#### Kompetensi

Minimum 23.0  
 Maximum 37.0  
 Rentang 14  
 N 35  
 Panj Kelas  $1 + 3.3 \log n$   
 6.09542  
 5  
 $\approx$  6  
 Panj Interval 2.3333  
 $\approx$  2.3

No.	Interval			Frekuensi	Persen(%)
1	23.0	-	25.3	1	2.9%
2	25.4	-	27.7	4	11.4%
3	27.8	-	30.1	5	14.3%
4	30.2	-	32.5	7	20.0%
5	32.6	-	34.9	7	20.0%
6	35.0	-	37.3	11	31.4%
Jumlah				35	100.0%

#### Pengalaman

Minimum 23.0  
 Maximum 37.0  
 Rentang 14  
 N 35  
 Panj Kelas  $1 + 3.3 \log n$   
 6.09542  
 5  
 $\approx$  6  
 Panj Interval 2.3333  
 $\approx$  2.3

No.	Interval			Frekuensi	Persen(%)
1	23.0	-	25.3	5	14.3%
2	25.4	-	27.7	10	28.6%
3	27.8	-	30.1	3	8.6%
4	30.2	-	32.5	4	11.4%
5	32.6	-	34.9	5	14.3%
6	35.0	-	37.3	8	22.9%
Jumlah				35	100.0%

		Kualitas Laporan					
Minimum	27.0	No.	Interval			Frekuensi	Persen(%)
Maximum	47.0	1	27.0	-	30.3	1	2.9%
Rentang	20	2	30.4	-	33.7		4
N	35	3	33.8	-	37.1	13	37.1%
Panj Kelas	1 + 3.3 log n	4	37.2	-	40.5		4
	6.09542	5	40.6	-	43.9	7	20.0%
	5	6	44.0	-	47.3		6
≈	6	Jumlah				35	100.0%
Panj Interval	3.3333						
≈	3.3						

### Frequencies Deskriptif

		<b>Statistics</b>			
		Etika	Kompetensi	Pengalaman	Kualitas laporan keuangan
N	Valid	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0
Mean		30,8857	32,1714	30,1714	37,8857
Median		31,0000	33,0000	30,0000	37,0000
Mode		32,00	34,00	27,00	34,00 <sup>a</sup>
Std. Deviation		5,55068	3,54372	4,34190	4,76983
Minimum		18,00	23,00	23,00	27,00
Maximum		40,00	37,00	37,00	47,00
Sum		1081,00	1126,00	1056,00	1326,00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

## Lampiran 11 :Hasil Uji Normalitas

**Hasil Uji Normalitas****NPar Tests****Chi-Square Test****Frequencies****Etika**

	Observed N	Expected N	Residual
18,00	1	1,9	-,9
20,00	1	1,9	-,9
21,00	2	1,9	,1
26,00	2	1,9	,1
27,00	2	1,9	,1
28,00	3	1,9	1,1
29,00	3	1,9	1,1
30,00	1	1,9	-,9
31,00	3	1,9	1,1
32,00	4	1,9	2,1
33,00	1	1,9	-,9
34,00	2	1,9	,1
35,00	2	1,9	,1
36,00	2	1,9	,1
37,00	1	1,9	-,9
38,00	3	1,9	1,1
39,00	1	1,9	-,9
40,00	1	1,9	-,9
Total	35		

**Kompetensi**

	Observed N	Expected N	Residual
23,00	1	2,7	-1,7
26,00	2	2,7	-,7
27,00	2	2,7	-,7
28,00	1	2,7	-1,7
29,00	1	2,7	-1,7
30,00	3	2,7	,3
31,00	4	2,7	1,3
32,00	3	2,7	,3
33,00	1	2,7	-1,7
34,00	6	2,7	3,3
35,00	5	2,7	2,3
36,00	4	2,7	1,3
37,00	2	2,7	-,7
Total	35		

**Pengalaman**

	Observed N	Expected N	Residual
23,00	2	2,7	-,7
25,00	3	2,7	,3
26,00	4	2,7	1,3
27,00	6	2,7	3,3
29,00	1	2,7	-1,7
30,00	2	2,7	-,7
31,00	2	2,7	-,7
32,00	2	2,7	-,7
33,00	3	2,7	,3
34,00	2	2,7	-,7
35,00	3	2,7	,3
36,00	3	2,7	,3
37,00	2	2,7	-,7
Total	35		

**Kualitas**

	Observed N	Expected N	Residual
27,00	1	2,3	-1,3
31,00	1	2,3	-1,3
32,00	1	2,3	-1,3
33,00	2	2,3	-,3
34,00	5	2,3	2,7
35,00	5	2,3	2,7
37,00	3	2,3	,7
38,00	3	2,3	,7
39,00	1	2,3	-1,3
41,00	4	2,3	1,7
42,00	1	2,3	-1,3
43,00	2	2,3	-,3
44,00	3	2,3	,7
45,00	2	2,3	-,3
47,00	1	2,3	-1,3
Total	35		

**Test Statistics**

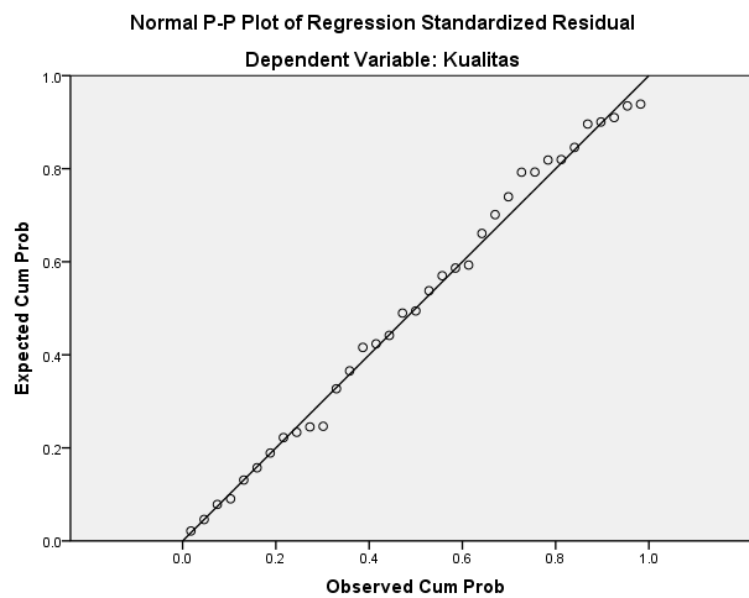
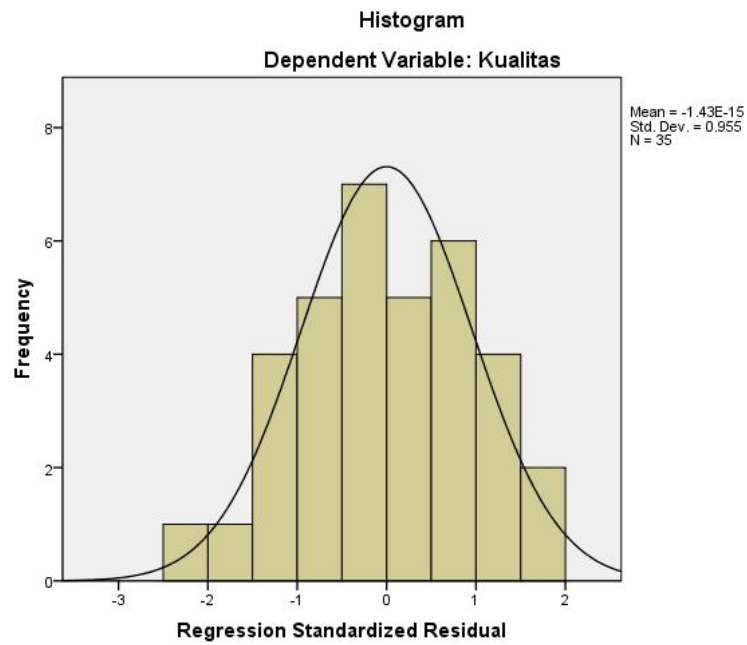
	Etika	Kompetensi	Pengalaman	Kualitas
Chi-Square	7,686 <sup>a</sup>	12,171 <sup>b</sup>	6,971 <sup>b</sup>	12,571 <sup>c</sup>
df	17	12	12	14
Asymp. Sig.	,973	,432	,859	,561

a, 18 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5, The minimum expected cell frequency is 1,9,

b, 13 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5, The minimum expected cell frequency is 2,7,

c, 15 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5, The minimum expected cell frequency is 2,3,

## Charts





## Lampiran 12 : Hasil Uji Linieritas

**Hasil Uji Linieritas****Means****Case Processing Summary**

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kualitas * Etika	35	100,0%	0	,0%	35	100,0%
Kualitas * Kompetensi	35	100,0%	0	,0%	35	100,0%
Kualitas * Pengalaman	35	100,0%	0	,0%	35	100,0%

**Kualitas Laporan Keuangan \* Etika****ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kualitas laporan keuangan * Etika	Between Groups	(Combined)	492,543	17	28,973	1,753	,129
		Linearity	303,167	1	303,167	18,341	,001
		Deviation from Linearity	189,376	16	11,836	,716	,745
	Within Groups		281,000	17	16,529		
	Total		773,543	34			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kualitas laporan keuangan * Etika	,626	,392	,798	,637

### Kualitas Laporan Keuangan \* Kompetensi

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kualitas laporan keuangan * Kompetensi	Between Groups	(Combined)	501,676	12	41,806	3,383	,006
		Linearity	299,643	1	299,643	24,248	,000
		Deviation from Linearity	202,033	11	18,367	1,486	,206
	Within Groups		271,867	22	12,358		
	Total		773,543	34			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kualitas laporan keuangan * Kompetensi	,622	,387	,805	,649

### Kualitas \* Pengalaman

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kualitas laporan keuangan * Pengalaman	Between Groups	(Combined)	308,126	12	25,677	1,214	,334
		Linearity	99,615	1	99,615	4,709	,041
		Deviation from Linearity	208,512	11	18,956	,896	,558
	Within Groups		465,417	22	21,155		
	Total		773,543	34			

### Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kualitas laporan keuangan * Pengalaman	,359	,129	,631	,398

## Lampiran 13: Hasil Uji Multikolinieritas

**Hasil Uji multikolinieritas****Regression****Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman, Kompetensi, Etika	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,983	5,798		-,515	,611		
Etika	,349	,099	,406	3,528	,001	,833	1,200
Kompetensi	,676	,149	,502	4,536	,000	,901	1,110
Pengalaman	,276	,121	,251	2,287	,029	,916	1,092

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

## Lampiran 14 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Hasil Uji Heteroskedastisitas****Nonparametric Correlations**

<b>Correlations</b>			<b>Etika</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>AbsRes</b>
Spearman's rho	Etika	Correlation Coefficient	1,000	,287	,237	-,093
		Sig. (2-tailed)	.	,094	,171	<b>,593</b>
		N	35	35	35	35
	Kompetensi	Correlation Coefficient	,287	1,000	,060	,001
		Sig. (2-tailed)	,094	.	,730	<b>,994</b>
		N	35	35	35	35
	Pengalaman	Correlation Coefficient	,237	,060	1,000	-,005
		Sig. (2-tailed)	,171	,730	.	<b>,979</b>
		N	35	35	35	35
	AbsRes	Correlation Coefficient	-,093	,001	-,005	1,000
		Sig. (2-tailed)	,593	,994	,979	.
		N	35	35	35	35

## Lampiran 15 : Hasil Uji Regresi

**Hasil Uji Regresi****Regression****Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman, Kompetensi, Etika	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,811 <sup>a</sup>	,657	,624	2,92445

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Kompetensi, Etika

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,417	3	169,472	19,816	,000 <sup>a</sup>
	Residual	265,125	31	8,552		
	Total	773,543	34			

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Kompetensi, Etika

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,983	5,798		-,515	,611
	Etika	,349	,099	,406	3,528	,001
	Kompetensi	,676	,149	,502	4,536	,000
	Pengalaman	,276	,121	,251	2,287	,029

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Lampiran 16 : Hasil Uji Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

**Summary Countribution**

Model		Countribution	
		Effective	Relative
1	Etika	25,4%	38,7%
	Kompetensi	31,2%	47,6%
	Pengalaman	9,0%	13,7%
	Total	65,7%	100,0%

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan